

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol selama satu periode pelaporan. Disamping itu, Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah juga digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya. Dengan demikian, penyusunan dan penyajian laporan keuangan satuan kerja ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dan/atau barang pada satuan kerja.

Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah secara umum mempunyai tujuan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum yang mendasari penyusunan laporan keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah, meliputi:

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Barang Daerah;
- h. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018;
- i. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 75 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- j. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 900/0016722 tanggal 24 November 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan APBD dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab 2 Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan

Bab 3 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Secara Umum
- 3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Bab 4 Kebijakan Akuntansi

- 4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD
- 4.2. Basis dan Prinsip Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada Dalam SAP pada SKPD

Bab 5 Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

- 5.1. Penjelasan Pos – Pos Laporan Realisasi Anggaran
 - 5.1.1. Pendapatan
 - 5.1.2. Belanja
- 5.2. Penjelasan Pos - Pos Neraca
 - 5.2.1 Aset
 - 5.2.2 Kewajiban
 - 5.2.3 Ekuitas Dana
- 5.3. Penjelasan Pos - Pos Laporan Operasional
 - 5.3.1. Pendapatan
 - 5.3.2. Beban
 - 5.3.3. Surplus Defisit Non Operasional
- 5.4. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

Bab 6 Penjelasan Atas Informasi Non Keuangan

Bab 7 Penutup

Lampiran Tambahan

BAB 2

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD SKPD

2.1. Ekonomi Makro

Arah kebijakan ekonomi daerah dilakukan dengan telaah terhadap dinamika ekonomi global dan kebijakan pembangunan ekonomi nasional yang berpengaruh terhadap kondisi dan kebijakan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah.

Ekonomi global belum sepenuhnya pulih, jika melihat rata-rata pertumbuhan ekonomi global dalam satu dekade terakhir (2013-2022) hanya sebesar 3,1 persen, lebih rendah dari dekade sebelumnya (2003-2012) yang mencapai 4,2 persen. Negara Tiongkok, yang tumbuh 10,6 persen pada dekade sebelumnya, melambat signifikan pada periode 2013-2022 sebesar 6,2 persen. Penyebab pelambatan ini terutama adalah karena (1) menguatnya perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok, (2) periode pengetatan kembali kebijakan moneter di AS pasca Global Financial Crisis (GFC) – yang kita kenal sebagai *tanper tantrum*, (3) pandemi covid-19, (4) perang Ukraina-Rusia yang menyebabkan kenaikan harga komoditas dan melonjaknya inflasi global, serta (5) dampak perubahan iklim yang semakin sering terjadi (BKF, 2023).

Proyeksi pertumbuhan ekonomi global yang dirilis oleh International Monetary Fund (IMF/Dana Moneter Internasional), World Bank (Bank Dunia) dan Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) pada bulan April dan Juni 2023 menunjukkan penurunan dari tahun sebelumnya. Dari capaian pertumbuhan ekonomi global Tahun 2022 yang sebesar 3,4 persen, IMF memprediksi Tahun 2023 akan tumbuh sebesar 2,8 persen, World Bank memprediksi Tahun 2023 akan tumbuh sebesar 2,1 persen, OECD memprediksi Tahun 2023 akan tumbuh sebesar 2,7 persen. Kemudian untuk tahun 2024, IMF memprediksi tumbuh sebesar 3,0 persen, World Bank memprediksi tumbuh sebesar 2,4 persen, OECD memprediksi tumbuh sebesar 2,9 persen. Perbedaan proyeksi pertumbuhan antar institusi tersebut menunjukkan masih tingginya ketidakpastian ekonomi global saat ini (BKF, 2023).

Sejalan dengan capaian nasional, perekonomian di Jawa Tengah menunjukkan perbaikan. Tahun 2020 pertumbuhan ekonomi sempat berkontraksi sebesar -2,65 persen (c-to-c) akibat dampak pandemi covid-19, kemudian mampu pulih lebih cepat tahun 2021 sebesar 3,32 persen (c-to-c), dan berlanjut dengan pemulihan yang kuat pada tahun 2022 tumbuh sebesar 5,31 persen (c-to-c). Angka capaian pertumbuhan pada triwulan II-2023 mencapai 5,23 persen (yoy). Kemudian untuk laju inflasi bulan Juli 2023 dalam tren yang menurun, tercatat sebesar 2,86% (y-o-y) lebih baik dari bulan Juni 2023 sebesar 3,18% (y-o-y). Kemudian Tingkat Pengangguran Terbuka di Jawa Tengah periode Februari 2023 adalah sebesar 5,24% turun 0,51% poin dibandingkan dengan Februari 2022 yang sebesar 5,75%, Persentase penduduk miskin Jawa Tengah pada Maret 2023 sebesar 10,77% turun 0,21% poin dibanding September 2022 sebesar 10,98%, rasio gini dari 0,368 Tahun 2021 turun menjadi 0,366 tahun 2022. Berdasarkan Sensus Penduduk (SP) pada Tahun 2020 jumlah Penduduk Jawa Tengah sebesar 36,52 juta jiwa dengan Laju Pertumbuhan Penduduk Jawa Tengah sebesar 1,17%. Jumlah Penduduk meningkat pada Tahun 2022 sebesar 37,03 juta jiwa. Berdasarkan laju Pertumbuhan Penduduk yang terkendali dan perekonomian Jawa Tengah yang stabil dan tetap tumbuh maka PDRB Per kapita Jawa Tengah Tahun

2023 ditargetkan akan tumbuh sebesar Rp. 43,11 juta/kapita. Melihat kondisi tersebut maka ekonomi Jawa Tengah diproyeksikan akan tetap tumbuh positif di tahun 2023 pada kisaran angka 5,20-5,60 persen. Pertumbuhan ekonomi yang positif diharapkan dapat berdampak pada penurunan angka kemiskinan, rasio gini dan tingkat pengangguran terbuka, serta meningkatnya PDRB per kapita di Jawa Tengah.

Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2023 diarahkan pada "Perwujudan Masyarakat Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Berdikari". Pembangunan perekonomian Jawa Tengah tahun 2023 difokuskan untuk memulihkan daya beli masyarakat dan dunia usaha untuk meningkatkan permintaan agregat. Upaya pemulihan juga dilakukan melalui diversifikasi ekonomi untuk mengakselerasi pertumbuhan sektor-sektor yang terkena dampak besar dari Covid-19 dan mendorong sektor lain yang berpotensi tumbuh lebih cepat. Beberapa strategi yang dilakukan untuk menjaga perekonomian daerah tahun 2023 tetap positif bahkan meningkat, serta mampu memulihkan ekonomi masyarakat antara lain:

- 1) Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana;
- 2) Mendorong peningkatan industri hilir pada sektor pertanian dan perkebunan;
- 3) Peningkatan pariwisata melalui perbaikan infrastruktur pendukung baik di kawasan perkotaan dan perdesaan serta event pariwisata untuk mendorong aktivitas ekonomi di daerah;
- 4) Mengoptimalkan peran dan fungsi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam upaya pengendalian harga dan inflasi;
- 5) Meningkatkan upaya stabilisasi stok dan harga komoditas pangan melalui bantuan transportasi dan subsidi harga;
- 6) Mendorong pengembangan UMKM melalui digitalisasi dan penggunaan produk UMKM;
- 7) Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, yang juga diarahkan untuk mendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem (PKE);
- 8) Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing; dan
- 9) Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah.

2.2. Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan daerah tidak lepas dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, tertib, akuntabel dan tepat serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kemanfaatan bagi kepentingan masyarakat. Dalam hal pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 disusun dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan tetap mempedomani kebijakan yang telah diamanatkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.

1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah Provinsi Jawa Tengah meliputi komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Kinerja pendapatan

daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain pertumbuhan ekonomi, kebijakan fiskal nasional terkait dengan dana transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, kebijakan pada harga bahan bakar minyak, perkiraan perkembangan pemasaran industri otomotif, dan realisasi pendapatan dari tahun sebelumnya.

Kinerja pendapatan daerah Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu tahun 2020-2022 menunjukkan bahwa realisasi pendapatan cenderung meningkat, namun demikian menurun di tahun 2021. Selama kurun waktu tahun 2020-2022, PAD memberikan sumbangan terbesar pada pendapatan daerah, diikuti dengan pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Penerimaan pajak masih menjadi penopang utama sektor pendapatan daerah terutama dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang di tahun 2022 meningkat dibandingkan tahun 2021. Sumber pendapatan lainnya adalah retribusi yang realisasi penerimaannya di tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021. Sedangkan pendapatan transfer yang bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya di tahun 2022 juga meningkat dibandingkan tahun 2021. Kontribusi rata-rata PAD terhadap pendapatan daerah tahun 2020-2022 sebesar 58,76 persen, pendapatan transfer sebesar 40,88 persen, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 0,24 persen. Sumber pendapatan utama PAD berasal dari komponen pajak daerah dengan kontribusi terhadap PAD rata-rata sebesar 81,38 persen.

Dalam RKPD Tahun 2023, pendapatan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 diproyeksikan sebesar 25,311 triliun rupiah. Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan sebesar 17,030 triliun rupiah, pendapatan transfer sebesar 8,201 triliun rupiah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 78,908 miliar rupiah. Sementara itu dalam APBD Tahun 2023, pendapatan daerah ditetapkan sebesar 26,190 triliun rupiah, dengan PAD sebesar 17,910 triliun rupiah, pendapatan transfer sebesar 8,201 triliun rupiah, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 78,908 miliar rupiah.

Sampai dengan tanggal 4 September 2023, pendapatan daerah telah terealisasi sebesar 60,75 persen. Realisasi terbesar adalah pada komponen Pendapatan Asli Daerah terealisasi 11,170 triliun rupiah atau 62,37 persen. Selanjutnya pada komponen Pendapatan Transfer terealisasi 4,725 triliun rupiah atau 57,61 persen, dan komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terealisasi 16,077 miliar rupiah atau 20,38 persen.

Mempertimbangkan kondisi realisasi tersebut, dengan asumsi proyeksi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,20 - 5,60 persen, serta kebijakan pemerintah pusat terkait dana transfer ke daerah, maka proyeksi pendapatan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 dilakukan penyesuaian menjadi sebesar 26,204 triliun rupiah, dengan PAD sebesar 17,922 triliun rupiah, pendapatan transfer sebesar 8,202 triliun rupiah, dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar 79,306 miliar rupiah. PAD diproyeksikan naik jika dibandingkan PAD dalam APBD Tahun 2023 sebesar 17,910 triliun rupiah. Kenaikan terjadi pada Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dari 631,115 miliar rupiah pada APBD 2023 menjadi 638,480 miliar rupiah pada Perubahan RKPD Tahun 2023. Selain itu, kenaikan juga terjadi pada Lain-lain Pendapatan Asli Daerah sebesar 1.875 triliun rupiah pada APBD Tahun 2023 menjadi 1,884 triliun rupiah di proyeksi perubahan RKPD Tahun 2023.

Upaya peningkatan kinerja pendapatan daerah akan terus ditempuh untuk mencapai target pendapatan. Tahun 2023, kebijakan pendapatan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan pada semua sumber melalui intensifikasi dan ekstensifikasi yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi. Upaya intensifikasi pendapatan ditempuh melalui upaya:

- a) Pemenuhan sarana dan prasarana peningkatan pelayanan pembayaran pajak;
- b) Melakukan sosialisasi kesadaran pembayaran pajak dan pelaksanaan door to door bekerjasama dengan PKK, Babinkamtibmas, Ormas, Bumdes;
- c) Peningkatan penagihan pajak kendaraan bermotor se-Jawa Tengah melalui program Gerakan Disiplin Pajak Untuk Rakyat (Gadis Pantura), dan program Samsat Badan Usaha Digital Mandiri (BUDIMAN);
- d) Pelayanan pajak kendaraan bermotor di perusahaan dengan jumlah tenaga kerja yang banyak;
- e) Meningkatkan pelayanan Samsat dengan beberapa inovasi seperti penambahan titik layanan kepada wajib pajak, program Pajak Untuk Rakyat Bangkit Bersama (Mitra Putra Bangsa) sebagai program apresiasi bagi wajib pajak yang taat pajak sekaligus memberikan ruang promosi bagi pelaku usaha yang terdampak pandemi, dan penyempurnaan SAMSAT Digital (New Sakpole).
- f) Meningkatkan koordinasi dan sinergi di bidang pendapatan daerah dengan Pemerintah Pusat, perangkat daerah penghasil, kabupaten dan kota, serta POLRI;
- g) Meningkatkan pelayanan dan fasilitas objek retribusi daerah sebagai upaya meningkatkan retribusi daerah;
- h) Meningkatkan peran dan fungsi UPT dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan;
- i) Pengembangan aplikasi Sistem Informasi Tarif Retribusi Online (Sitari-on) untuk pembayaran non tunai retribusi;
- j) Penguatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dan menjaga tingkat kesehatan BUMD untuk dapat meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah;
- k) Penguatan kelembagaan dan sinergi antar BUMD dan Perangkat Daerah serta mengembangkan potensi usaha; dan
- l) Revitalisasi dan pendayagunaan aset milik pemerintah provinsi agar dapat menarik minat investor dan dikerjasamakan sebagai sumber pendapatan daerah.

2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Arah kebijakan belanja daerah mengalami peningkatan kinerja pendapatan dari tahun ke tahun, sehingga realisasi belanja daerah juga mengalami peningkatan. Peningkatan realisasi terjadi pada komponen belanja barang dan jasa (dari 5,344 triliun rupiah pada tahun 2021 menjadi 5,377 triliun rupiah pada tahun 2022) yang sejalan dengan menurunnya level PPKM sehingga kegiatan pemulihan ekonomi daerah mulai terlaksana dalam kondisi “new normal” dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Demikian juga pada komponen belanja modal, dimana realisasi tahun 2021 hanya sebesar 1.447 triliun rupiah bertambah menjadi 1.713 triliun rupiah di tahun 2022 guna meningkatkan infrastruktur untuk pemulihan ekonomi daerah dan peningkatan pelayanan

terhadap masyarakat. Belanja pegawai pun turut meningkat dari 5,685 triliun rupiah pada tahun 2021 menjadi sebesar 5,902 di tahun 2022.

Selain itu, peningkatan realisasi belanja juga terjadi pada komponen bagi hasil (5,735 triliun rupiah di tahun 2021 menjadi 6,085 triliun rupiah di tahun 2022) selaras dengan mulai naiknya pendapatan daerah. Realisasi belanja bantuan keuangan juga naik dari 1,661 triliun rupiah di tahun 2021 menjadi sebesar 2,677 triliun rupiah di tahun 2022. Kenaikan terjadi juga pada belanja bantuan sosial meningkat dari 66,180 miliar rupiah di tahun 2021 menjadi sebesar 78,894 miliar rupiah di tahun 2022, sedangkan penurunan terjadi pada realisasi belanja hibah di tahun 2021 sebesar 5,728 triliun rupiah menjadi 2,092 triliun rupiah di tahun 2022.

Penurunan juga terjadi pada komponen belanja tak terduga (realisasi 72,303 miliar rupiah pada tahun 2021 menjadi 16,545 miliar rupiah pada tahun 2022), dimana pada tahun 2022 penanganan dampak pandemi Covid-19 sudah dapat direncanakan dengan lebih baik sehingga alokasi belanja tak terduga sudah sesuai program/kegiatan pada belanja.

Belanja daerah yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2023 adalah sebesar 25,883 triliun rupiah yang terdiri dari belanja operasi sebesar 14,842 triliun rupiah, belanja modal sebesar 1,965 triliun rupiah, belanja tidak terduga sebesar 23,1 miliar rupiah, dan belanja transfer sebesar 9,052 triliun rupiah. Sedangkan dalam APBD Tahun 2023 belanja daerah ditetapkan menjadi sebesar 26,763 triliun rupiah yang terdiri dari belanja operasi sebesar 15,147 triliun rupiah, belanja modal 1,929 triliun rupiah, belanja tak terduga sebesar 57,964 miliar rupiah, dan belanja transfer sebesar 9,628 triliun rupiah. Dengan memperhatikan kebijakan untuk mengoptimalkan fiskal dan kebijakan dana transfer dari pemerintah pusat di tahun 2023 ini maka dalam perubahan RKPD Tahun 2023 belanja daerah dilakukan penyesuaian. Proyeksi belanja daerah dalam perubahan RKPD menjadi sebesar 27,071 triliun rupiah yang terdiri dari belanja operasi sebesar 15,222 triliun rupiah, belanja modal sebesar 2,028 triliun rupiah, belanja tak terduga sebesar 25 miliar rupiah, dan belanja transfer sebesar 9,794 triliun rupiah. Kebijakan belanja pada perubahan RKPD Tahun 2023 diarahkan pada:

1. Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat;
2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran serta penanganan masalah sosial;
3. Dukungan implementasi kebijakan Penanganan Kemiskinan Ekstrem (PKE) di seluruh kabupaten;
4. Pencapaian target, sasaran dan program unggulan RPJMD 2018-2023;
5. Upaya pemenuhan alokasi persentase belanja sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan dan disesuaikan dengan potensi anggaran;
6. Dukungan kebijakan, rencana program/kegiatan pembangunan dan pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes Tegal – Pemalang dan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
7. Kesiapsiagaan terhadap bencana baik alam maupun non alam;

8. Upaya mengakomodir masukan usulan pembangunan yang disampaikan melalui pokok-pokok pikiran/aspirasi DPRD, masukan masyarakat dari berbagai forum koordinasi di bidang perencanaan dengan tetap memperhatikan kapasitas, kewenangan, prioritas pembangunan serta peraturan perundangan yang berlaku;
9. Meningkatkan sinergi pembangunan antar wilayah dan daerah dalam penyelesaian permasalahan dan pencapaian prioritas pembangunan tahun 2023 melalui bantuan keuangan kepada kabupaten/kota dan bantuan keuangan kepada pemerintah desa; serta
10. Persiapan penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah, struktur belanja daerah tahun 2023 terdiri dari:

1. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi:
 - a. Pada Perubahan Tahun 2023 dilakukan penyesuaian Belanja Pegawai berdasarkan kebutuhan riil termasuk gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan PNS serta alokasi kebutuhan untuk PPPK formasi Tahun 2022 dan 2023.
 - b. Belanja Barang dan Jasa mengalami penyesuaian diantaranya:
 - 1) Intervensi penanggulangan kemiskinan (termasuk kemiskinan ekstrem) dengan pembangunan sarana prasarana SPAM Perdesaan kepada masyarakat tidak mampu;
 - 2) Penyesuaian Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) untuk pemenuhan Honor GTT/PTT dan peningkatan sarana prasarana bidang pendidikan;
 - 3) Pengiriman atlet pada Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (POMNas) 2023 di Banjarmasin serta pemberian tali asih kepada atlet yang meraih medali di Sea Games Vietnam 2022, Sea Games Kamboja 2023, ASEAN Para Games Kamboja 2023 dan Special Olympic World Games di Berlin 2023;
 - 4) Pemeliharaan jalan pada ruas jalan provinsi;
 - 5) Pemenuhan kebutuhan BBM solar Bus Trans Jateng akibat adanya kenaikan tarif;
 - 6) Pemenuhan kontribusi pada penerima BPJS Kesehatan PBI (Penerima Bantuan Iuran);
 - 7) Pemeliharaan dan pemenuhan sarana prasarana rumah dinas jabatan;
 - 8) Pemenuhan kegiatan sosialisasi penguatan demokrasi daerah;
 - c. Belanja Subsidi pada perubahan Tahun 2023 mengalami penyesuaian dengan peningkatan ketersediaan cadangan pangan pemerintah dalam rangka antisipasi kekurangan akibat badai El Nino.
 - d. Belanja Hibah pada perubahan Tahun 2023 mengalami penyesuaian antara lain digunakan untuk hibah sarana prasarana untuk mendukung usaha pertanian tembakau melalui SiLPA DBHCHT serta hibah kepada instansi vertikal dan organisasi kepemudaan.
 - e. Belanja Bantuan Sosial pada perubahan Tahun 2023 dilakukan penyesuaian pada penerima Beasiswa Siswa Miskin (BSM) dan perlindungan sosial bagi masyarakat non produktif melalui program Kartu Jateng Sejahtera (KJS) serta pemberian bantuan berupa ayam siap bertelur dan sarana pendukungnya kepada masyarakat tidak mampu.

2. Belanja Modal mengalami penyesuaian yang digunakan untuk antara lain pembebasan lahan jembatan jagung di Kabupaten Pekalongan; pengadaan server, serta sarana prasarana pendukung guna mengolah big data, dan monitoring data; pengadaan kendaraan dinas operasional mendukung mobilitas perangkat daerah; pengadaan alat kesehatan pendukung layanan kesehatan dari alokasi DBHCHT; dan penyesuaian sisa lelang dari pekerjaan fisik infrastruktur.
3. Belanja Tidak Terduga pada perubahan Tahun 2023 dilakukan penyesuaian berdasarkan kebutuhan dan realisasi belanja.
4. Belanja Transfer pada Perubahan Tahun 2023 dilakukan penyesuaian pada alokasi Belanja Bagi Hasil dikarenakan adanya kurang salur Bagi Hasil tahun 2022 atas hasil audit BPK dan penyesuaian pada Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa.

3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya.

Selama kurun waktu tahun 2020-2022, penerimaan pembiayaan didapatkan dari SiLPA tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, penerimaan pengembalian dana bergulir, dan penerimaan kembali piutang. Pengeluaran pembiayaan pada periode tahun yang sama diperuntukkan bagi penyertaan modal dan pembayaran pokok pinjaman kepada bank. Namun di tahun 2020 tidak ada pengeluaran pembiayaan karena penganggaran lebih difokuskan untuk penanganan pandemi Covid-19. Sedangkan penerimaan pembiayaan didapatkan dari SiLPA tahun sebelumnya dan penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah.

Kebijakan pembiayaan daerah tahun 2023 diarahkan pada penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan daerah yang diarahkan pada pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah dialokasikan untuk pembentukan dana cadangan Pilkada dan penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban penyertaan modal BUMD yang dikelola dengan prinsip kehati-hatian (prudential) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu sejalan dengan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 dan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020, terdapat pembangunan dan pengembangan infrastruktur di Jawa Tengah yang akan dilaksanakan oleh BUMD Provinsi Jawa Tengah yang berpotensi adanya penyertaan modal investasi dari Pemerintah Provinsi.

Nilai pembiayaan netto dalam RKPD Tahun 2023 dan APBD Tahun 2023 sama yaitu sebesar 572,2 miliar rupiah. Dengan memperhatikan realisasi belanja untuk pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan Triwulan II tahun 2023 maka perlu dilakukan penyesuaian nilai pembiayaan baik penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan. Dalam perubahan RKPD Tahun 2023 nilai pembiayaan netto menjadi 866,4 miliar rupiah.

BAB 3

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah
 Fungsi : Ketentraman dan Ketertiban Umum
 Sub Fungsi : Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri
 Provinsi : Jawa Tengah

No	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN		KETERANGAN
			Rp	%	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	611.106.972.000	611.106.972.000	100	609.673.519.917	99,77	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	16.872.475.000	16.872.475.000	100	16.306.327.281	96,64	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1690.157.000	1690.157.000	100	1688.262.416	99,89	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **	523.129.000	523.129.000	100	522.431510	99,87	
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **	1.167.028.000	1.167.028.000	100	1.165.830.906	99,9	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.258.012.000	9.258.012.000	100	8.813.641027	95,2	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **	9.032.892.000	9.032.892.000	100	8.603.241027	95,24	Sesuai dengan Kebutuhan
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **	222.120.000	222.120.000	100	207.400.000	93,37	Sesuai dengan Kebutuhan
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD **	1500.000	1500.000	100	1500.000	100	
4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD **	1500.000	1500.000	100	1500.000	100	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	80.000.000	80.000.000	100	79.551834	99,44	
1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **	80.000.000	80.000.000	100	79.551834	99,44	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	320.500.000	320.500.000	100	314.366.698	98,09	
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian **	15.000.000	15.000.000	100	13.514.698	90,1	Sesuai dengan Kebutuhan
2	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai **	15.000.000	15.000.000	100	14.164.000	94,43	Sesuai dengan Kebutuhan
3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi **	60.000.000	60.000.000	100	60.000.000	100	
4	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan **	230.500.000	230.500.000	100	226.688.000	98,35	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1206.006.000	1206.006.000	100	1.199.746.204	99,48	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	16.500.000	16.500.000	100	16.500.000	100	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	205.000.000	205.000.000	100	205.000.000	100	
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	108.000.000	108.000.000	100	102.467.400	94,88	Sesuai dengan Kebutuhan
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor **	190.000.000	190.000.000	100	189.500.000	99,74	
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	85.000.000	85.000.000	100	84.964.025	99,96	
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	25.000.000	25.000.000	100	25.000.000	100	
7	Fasilitasi Kunjungan Tamu **	60.650.000	60.650.000	100	60.565.620	99,86	
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	440.856.000	440.856.000	100	440.749.159	99,98	
9	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **	15.000.000	15.000.000	100	15.000.000	100	
10	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD **	60.000.000	60.000.000	100	60.000.000	100	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	202.000.000	202.000.000	100	187.365.000	92,75	Sesuai dengan Kebutuhan
1	Pengadaan Mebel **	50.000.000	50.000.000	100	39.905.000	79,81	Sesuai dengan Kebutuhan
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **	151.000.000	151.000.000	100	146.460.000	96,99	
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	1000.000	1000.000	100	1000.000	100	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.480.500.000	3.480.500.000	100	3.399.618.691	97,68	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	4.500.000	4.500.000	100	4.500.000	100	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	435.000.000	435.000.000	100	433.344.803	99,62	
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	3.041.000.000	3.041.000.000	100	2.961.773.888	97,39	

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	635.300.000	635.300.000	100	623.775.411	98,19	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan **	225.000.000	225.000.000	100	215.036.868	95,57	Sesuai dengan Kebutuhan
2	Pemeliharaan Mebel **	3.000.000	3.000.000	100	3.000.000	100	
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **	10.000.000	10.000.000	100	108.54.1431	98,67	
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	274.000.000	274.000.000	100	273.954.712	99,98	
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	23.300.000	23.300.000	100	23.242.400	99,75	
	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	5.325.630.000	5.325.630.000	100	5.277.519.938	99,1	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	5.325.630.000	5.325.630.000	100	5.277.519.938	99,1	
1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan **	36.393.000	36.393.000	100	36.205.000	99,48	
2	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan **	4.957.401.000	4.957.401.000	100	4.910.219.998	99,05	
3	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan **	139.486.000	139.486.000	100	139.076.030	99,71	
4	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan **	192.350.000	192.350.000	100	192.018.910	99,83	
	PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	434.505.650.000	434.505.650.000	100	434.448.882.400	99,99	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	434.505.650.000	434.505.650.000	100	434.448.882.400	99,99	
1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah **	41010.000	41010.000	100	41010.000	100	
2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah **	297.900.000	297.900.000	100	291.400.000	97,82	
3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah **	5.056.870.000	5.056.870.000	100	5.015.579.400	99,18	
4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah **	421.745.000	421.745.000	100	418.668.000	99,27	
5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah **	428.688.125.000	428.688.125.000	100	428.682.225.000	100	

	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	120.781.242.000	120.781.242.000	100	120.289.987.260	99,59	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	120.781.242.000	120.781.242.000	100	120.289.987.260	99,59	
1	Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah **	44.976.000	44.976.000	100	44.963.000	99,97	
2	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah **	3.277.630.000	3.277.630.000	100	3.262.303.149	99,53	
3	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah **	364.136.000	364.136.000	100	362.435.990	99,53	
4	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah **	117.094.500.000	117.094.500.000	100	116.620.285.121	99,6	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	4.185.255.000	4.185.255.000	100	4.145.964.921	99,06	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	4.185.255.000	4.185.255.000	100	4.145.964.921	99,06	
1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah **	515.15.000	515.15.000	100	51498.000	99,97	
2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah **	113.905.000	113.905.000	100	113.872.000	99,97	
3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah **	3.531.025.000	3.531.025.000	100	3.492.348.385	98,9	
4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah **	295.870.000	295.870.000	100	295.321.000	99,81	
5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah **	192.940.000	192.940.000	100	192.925.536	99,99	
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	29.436.720.000	29.436.720.000	100	29.204.838.117	99,21	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	29.436.720.000	29.436.720.000	100	29.204.838.117	99,21	
1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah **	38.020.000	38.020.000	100	37.220.000	97,9	
2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah **	648.000.000	648.000.000	100	623.955.642	96,29	

3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah **	3.370.790.000	3.370.790.000	100	3.263.260.800	96,81	
4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah **	1.397.620.000	1.397.620.000	100	1.371.934.175	98,16	
5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah **	22.472.290.000	22.472.290.000	100	22.472.167.500	100	
6	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi **	1510.000.000	1510.000.000	100	1.436.300.000	95,12	Sesuai dengan Kebutuhan

3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah pada Tahun Anggaran 2023 telah berupaya optimal untuk mencapai target kinerja sesuai dengan yang direncanakan. Pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik, tidak ada kendala-kendala berat yang dihadapi.

BAB 4

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah adalah salah satu entitas akuntansi dibawah Kementerian Negara/Lembaga yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca disertai Catatan Atas Laporan Keuangan.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran dan basis akrual untuk pengakuan asset, kewajiban dan akuitas dana dalam neraca.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Dalam pengakuan dan pengukuran mencakup kebijakan harga perolehan dan kapitalisasi asset. Kebijakan harga perolehan merupakan pengakuan terhadap jumlah kas/setara kas yang dibayarkan terdiri dari belanja modal, belanja administrasi pembelian/pembangunan, belanja pengiriman, pajak dan nilai wajar imbalan lainnya yang dibayarkan sebagaimana komponen harga perolehan asset tetap. Kebijakan kapitalisasi asset merupakan pengakuan terhadap jumlah kas/setara kas dan nilai wajar imbalan lainnya yang dibayarkan nilai asset tetap.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan pada SKPD

Entitas pelaporan dan entitas akuntansi menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintahan daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah yang mengacu pada peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah.

BAB 5

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

5.1. PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dan Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2023. Penjelasan mengenai anggaran dan realisasi APBD TA 2023 adalah sebagai berikut:

5.1.1. PENDAPATAN DAERAH Rp,00

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah **TIDAK ADA** Pendapatan Daerah.

5.1.2. BELANJA DAERAH Rp609.673.519.917,00

Belanja Daerah dianggarkan sebesar Rp611.106.972.000,00 dengan realisasi sebesar Rp609.673.519.917,00 atau 99,77%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp115.202.682.339,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp407.452.914.378,00 atau 353,68% dengan rincian sebagai berikut :

5.1.2.1. BELANJA OPERASIONAL Rp609.487.154.917,00

Belanja Operasional dianggarkan sebesar Rp610.905.972.000,00 dengan realisasi sebesar Rp609.487.154.917,00 atau 99,77%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp114.976.440.989,00 mengalami kenaikan sebesar Rp407.492.790.728,00 atau 354,41% dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2023 (Rp)	%	2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1 Belanja Pegawai	9.255.012.000,00	8.810.641.027,00	95,20	8.153.647.108,00	656.993.919,00	8,06
2 Belanja Barang dan Jasa	34.738.152.000,00	34.237.705.890,00	98,56	27.744.509.081,00	6.493.196.809,00	23,40
3 Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
4 Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-
5 Belanja Hibah	566.912.808.000,00	566.438.808.000,00	99,92	79.078.284.800,00	400.342.600.000,00	506,26
6 Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-	-	-
Jumlah	610.905.972.000,00	609.487.154.917,00	99,77	114.976.440.989,00	407.492.790.728,00	354,41

5.1.2.1.1. Belanja Pegawai Rp8.810.641.027,00

Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp9.255.012.000,00 dengan realisasi sebesar Rp8.810.641.027,00 atau 95,20%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp8.153.647.108,00 mengalami kenaikan sebesar Rp656.993.919,00 atau 8,06% dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2023 (Rp)	%	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.746.725.000,00	3.710.493.236,00	99,03	3.694.455.365,00	16.037.871,00	0,43
2 Belanja Tambahan Penghasilan ASN	5.286.167.000,00	4.892.747.791,00	92,56	4.246.071.743,00	646.676.048,00	15,23
3 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	222.120.000,00	207.400.000,00	93,37	213.120.000,00	(5.720.000,00)	(2,68)
4 Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	-	-	-	-	-	-
5 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	-	-	-	-	-	-
6 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	-	-	-	-	-	-
7 Belanja Pegawai BOS	-	-	-	-	-	-
8 Belanja Pegawai BLUD	-	-	-	-	-	-
Jumlah	9.255.012.000,00	8.810.641.027,00	95,20	8.153.647.108,00	656.993.919,00	8,06

5.1.2.1.1.1 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Rp3.710.493.236,00

Belanja Gaji dan Tunjangan ASN dianggarkan sebesar Rp3.746.725.000,00 dengan realisasi sebesar Rp3.710.493.236,00 atau 99,03%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp3.694.455.365,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp16.037.871,00 atau 0,43% dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2023 (Rp)	%	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1 Belanja Gaji Pokok ASN	2.720.309.000,00	2.715.803.100,00	99,83	2.704.562.160,00	11.240.940,00	0,42
2 Belanja Tunjangan Keluarga ASN	263.354.000,00	262.698.458,00	99,75	261.095.186,00	1.603.272,00	0,61
3 Belanja Tunjangan Jabatan ASN	126.310.000,00	126.140.000,00	99,87	143.600.000,00	(17.460.000,00)	(12,16)
4 Belanja Tunjangan Fungsional ASN	88.516.000,00	88.480.000,00	99,96	60.880.000,00	27.600.000,00	45,34
5 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	101.114.000,00	100.003.954,00	98,90	97.220.000,00	2.783.954,00	2,86
6 Belanja Tunjangan Beras ASN	147.594.000,00	146.650.500,00	99,36	145.709.040,00	941.460,00	0,65
7 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	23.068.000,00	16.242.100,00	70,41	16.434.662,00	(192.562,00)	(1,17)
8 Belanja Pembulatan Gaji ASN	32.000,00	30.800,00	96,25	34.432,00	(3.632,00)	(10,55)
9 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	253.997.000,00	232.095.907,00	91,38	242.656.156,00	(10.560.249,00)	(4,35)
10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	5.608.000,00	5.587.104,00	99,63	5.565.933,00	21.171,00	0,38
11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	16.823.000,00	16.761.313,00	99,63	16.697.796,00	63.517,00	0,38
12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	-	-	-	-	-	-
13 Belanja Jaminan Hari Tua ASN	-	-	-	-	-	-
14 Belanja Tunjangan Khusus*)	-	-	-	-	-	-
15 Belanja Zakat ASN	-	-	-	-	-	-
Jumlah	3.746.725.000,00	3.710.493.236,00	99,03	3.694.455.365,00	16.037.871,00	0,43

5.1.2.1.1.2 Belanja Tambahan Penghasilan ASN Rp4.892.747.791,00

Belanja Tambahan Penghasilan ASN dianggarkan sebesar Rp5.286.167.000,00 dengan realisasi sebesar Rp4.892.747.791,00 atau 92,56%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp4.246.071.743,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp646.676.048,00 atau 15,23% dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2023 (Rp)	%	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%	
1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	5.286.167.000,00	4.892.747.791,00	92,56	4.246.071.743,00	646.676.048,00	15,23
2	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	-	-	-	-	-	-
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	-	-	-	-	-	-
4	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	-	-	-	-	-	-
5	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	5.286.167.000,00	4.892.747.791,00	92,56	4.246.071.743,00	646.676.048,00	15,23

5.1.2.1.1.3 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp207.400.000,00

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN dianggarkan sebesar Rp222.120.000,00 dengan realisasi sebesar Rp207.400.000,00 atau 93,37%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp213.120.000,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp5.720.000,00 atau 2,68% dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2023 (Rp)	%	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%	
1	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	-	-	-	-	-	
2	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	-	-	-	-	-	
3	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	-	-	-	-	-	
4	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	-	-	-	-	-	
5	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	-	-	-	-	-	
6	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	-	-	-	-	-	
7	Belanja Honorarium	222.120.000,00	207.400.000,00	93,37	213.120.000,00	(5.720.000,00)	(2,68)
8	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	-	-	-	-	-	
	Jumlah	222.120.000,00	207.400.000,00	93,37	213.120.000,00	(5.720.000,00)	(2,68)

5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa Rp34.237.705.890,00

Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp34.738.152.000,00 dengan realisasi sebesar Rp34.237.705.890,00 atau 98,56%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp27.744.509.081,00 mengalami kenaikan sebesar Rp6.493.196.809,00 atau 23,40% dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2023 (Rp)	%	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%	
1	Belanja Barang	5.940.999.000,00	5.930.955.545,00	99,83	4.444.162.032,00	1.486.793.513,00	33,45
2	Belanja Jasa	15.090.654.000,00	14.615.371.525,00	96,85	12.616.264.907,00	1.999.106.618,00	15,85
3	Belanja Pemeliharaan	610.550.000,00	608.258.411,00	99,62	618.110.876,00	(9.852.465,00)	(1,59)
4	Belanja Perjalanan Dinas	13.025.449.000,00	13.012.620.409,00	99,90	9.975.321.266,00	3.037.299.143,00	30,45
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	70.500.000,00	70.500.000,00	100,00	90.650.000,00	(20.150.000,00)	(22,23)
6	Belanja Barang dan Jasa BOP	-	-	-	-	-	
7	Belanja Barang dan Jasa BOS	-	-	-	-	-	
8	Belanja Barang dan Jasa BLUD	-	-	-	-	-	
	Jumlah	34.738.152.000,00	34.237.705.890,00	98,56	27.744.509.081,00	6.493.196.809,00	23,40

5.1.2.1.2.1 Belanja Barang Rp5.930.955.545,00

Belanja Barang dianggarkan sebesar Rp5.940.999.000,00 dengan realisasi sebesar Rp5.930.955.545,00 atau 99,83%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp4.444.162.032,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp1.486.793.513,00 atau 33,45% dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2023 (Rp)	%	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1 Belanja Barang Habis Pakai	5.940.999.000,00	5.930.955.545,00	99,83	4.444.162.032,00	1.486.793.513,00	33,45
2 Belanja Barang Tak Habis Pakai	-	-	-	-	-	-
3 Belanja Barang Bekas Dipakai	-	-	-	-	-	-
	5.940.999.000,00	5.930.955.545,00	99,83	4.444.162.032,00	1.486.793.513,00	33,45

5.1.2.1.2.2 Belanja Jasa Rp14.615.371.525,00

Belanja Jasa dianggarkan sebesar Rp15.090.654.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 14.615.371.525,00 atau 96,85%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp12.616.264.907,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp1.999.106.618,00 atau 15,85 % dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2023 (Rp)	%	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1 Belanja Jasa Kantor	14.264.988.000,00	13.901.979.133,00	97,46	11.892.561.293,00	2.009.417.840,00	16,90
2 Belanja Luran Jaminan/Asuransi	225.966.000,00	165.842.392,00	73,39	126.293.614,00	39.548.778,00	31,31
3 Belanja Sewa Tanah	-	-	-	10.000.000,00	(10.000.000,00)	(100,00)
4 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	196.700.000,00	195.200.000,00	99,24	300.500.000,00	(105.300.000,00)	(35,04)
5 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	343.000.000,00	292.350.000,00	85,23	208.950.000,00	83.400.000,00	39,91
6 Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	-	-	-	-	-	-
7 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	-	-	-	18.200.000,00	(18.200.000,00)	(100,00)
8 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	-	-	-	-	-	-
9 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	-	-	-	-	-	-
10 Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availability Payment</i>)	-	-	-	-	-	-
11 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	-	-	-	-	-	-
12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan PNS/PPPK	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	59.760.000,00	240.000,00	0,40
13 Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	-	-	-	-	-	-
14 Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	-	-	-	-	-	-
15 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	-	-	-	-	-	-
Jumlah	15.090.654.000,00	14.615.371.525,00	96,85	12.616.264.907,00	1.999.106.618,00	15,85

5.1.2.1.2.3 Belanja Pemeliharaan Rp608.258.411,00

Belanja Pemeliharaan dianggarkan sebesar Rp610.550.000,00 dengan realisasi sebesar Rp608.258.411,00 atau 99,62%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp618.110.876,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp9.852.465,00 atau 1,59% dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2023 (Rp)	%	2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1 Belanja Pemeliharaan Tanah	-	-	-	-	-	-
2 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	313.250.000,00	311.061.299,00	99,30	343.925.478,00	(32.864.179,00)	(9,56)
3 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	297.300.000,00	297.197.112,00	99,97	274.185.398,00	23.011.714,00	8,39

4	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-	-	-	-	-	-
5	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-	-
6	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	-	-	-	-	-	-
Jumlah		610.550.000,00	608.258.411,00	99,62	618.110.876,00	(9.852.465,00)	(1,59)

5.1.2.1.2.4 Belanja Perjalanan Dinas Rp13.012.620.409,00

Belanja Perjalanan Dinas dianggarkan sebesar Rp13.025.449.000,00 dengan realisasi sebesar Rp13.012.620.409,00 atau 99,90%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp9.975.321.266,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp3.037.299.143,00 atau 30,45% dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2023 (Rp)	%	2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%	
1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	13.025.449.000,00	13.012.620.409,00	99,90	9.975.321.266,00	3.037.299.143,00	30,45
2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	-	-	-	-	-	-
Jumlah		13.025.449.000,00	13.012.620.409,00	99,90	9.975.321.266,00	3.037.299.143,00	30,45

5.1.2.1.2.5 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp70.500.000,00

Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dianggarkan sebesar Rp70.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp70.500.000,00 atau 100%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp90.650.000,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp20.150.000,00 atau 22,23% dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2023 (Rp)	%	2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%	
1	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	70.500.000,00	70.500.000,00	100,00	90.650.000,00	(20.150.000,00)	(22,23)
2	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	-	-	-	-	-	-
Jumlah		70.500.000,00	70.500.000,00	100,00	90.650.000,00	(20.150.000,00)	(22,23)

5.1.2.1.3. Belanja Bunga Rp,00

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah **TIDAK ADA** Belanja Bunga.

5.1.2.1.4. Belanja Subsidi Rp,00

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah **TIDAK ADA** Belanja Subsidi.

5.1.2.1.5. Belanja Hibah Rp566.438.808.000,00

Belanja Hibah dianggarkan sebesar Rp566.912.808.000,00 dengan realisasi sebesar Rp566.438.808.000,00 atau 99,92%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp79.078.284.800,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp400.342.600.000,00 atau 506,26% dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2023 (Rp)	%	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	416.389.000.000,00	416.389.000.000,00	100,00	16.046.400.000,00	400.342.600.000,00	2.494,91
2 Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	116.574.000.000,00	116.100.000.000,00	99,59	42.662.000.000,00	-	-
3 Belanja Hibah kepada BUMN	-	-	-	-	-	-
4 Belanja Hibah kepada BUMD	-	-	-	-	-	-
5 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	-	-	-	-	-	-
6 Belanja Hibah Dana BOS	-	-	-	-	-	-
7 Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	33.949.808.000,00	33.949.808.000,00	100,00	20.369.884.800,00	-	-
Jumlah	566.912.808.000,00	566.438.808.000,00	99,92	79.078.284.800,00	400.342.600.000,00	506,26

5.1.2.1.5.1 Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat Rp416.389.000.000,00,00

Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat dianggarkan sebesar Rp416.389.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp416.389.000.000,00 atau 100%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp16.046.400.000,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp400.342.600.000,00 atau 2.494,91% dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2023 (Rp)	%	2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1 Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	416.389.000.000,00	416.389.000.000,00	100,00	16.046.400.000,00	400.342.600.000,00	2.494,91
2 Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	-	-	0	-	-	0
3 Belanja Hibah Jasa kepada Pemerintah Pusat	-	-	-	-	-	-
Jumlah	416.389.000.000,00	416.389.000.000,00	100,00	16.046.400.000,00	400.342.600.000,00	2.494,91

Rincian Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat:

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2023 (Rp)	%	2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Komando Daerah Militer (KODAM) IV/Diponegoro	10.413.250.000,00	10.413.250.000,00	100,00	9.300.000.000,00	1.113.250.000,00	11,97
Kepolisian Daerah (Polda) Jateng	10.578.150.000,00	10.578.150.000,00	100,00	5.114.900.000,00	5.463.250.000,00	106,81
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah	316.643.452.000,00	316.643.452.000,00	100,00	-	316.643.452.000,00	-
Komando Pendidikan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) Pangkalan TNI AU Adi Soemarmo	583.000.000,00	583.000.000,00	100,00	200.000.000,00	383.000.000,00	191,50
Pangkalan Utama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) V Pangkalan TNI AL Semarang	121.000.000,00	121.000.000,00	100,00	700.000.000,00	(579.000.000,00)	(82,71)
Pangkalan Utama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) V Pangkalan TNI AL Cilacap	121.000.000,00	121.000.000,00	100,00	181.500.000,00	(60.500.000,00)	(33,33)
Pangkalan Utama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) V Pangkalan TNI AL Tegal	121.000.000,00	121.000.000,00	100,00	150.000.000,00	(29.000.000,00)	(19,33)
Komando Pendidikan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) Pangkalan TNI AU Jend. Soedirman	121.000.000,00	121.000.000,00	100,00	200.000.000,00	(79.000.000,00)	(39,50)
Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	200.000.000,00	0	-
Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Jawa Tengah	77.487.148.000,00	77.487.148.000,00	100,00	-	77.487.148.000,00	-
Jumlah	416.389.000.000,00	416.389.000.000,00	100,00	16.046.400.000,00	400.342.600.000,00	2.494,91

5.1.2.1.5.2 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Rp,00

Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia dianggarkan sebesar Rp,00 dengan realisasi sebesar Rp,00 atau %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp,00 mengalami **kenaikan/penurunan*** sebesar Rp,00 atau % dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2023 (Rp)	%	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela, dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-	-
2 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan terdaftar	-	-	-	-	-	-
3 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	116.574.000.000,00	116.100.000.000,00	99,59	42.662.000.000,00	73.438.000.000,00	172,14
4 Belanja Hibah kepada Koperasi	-	-	-	-	-	-
Jumlah	116.574.000.000,00	116.100.000.000,00	99,59	42.662.000.000,00	73.438.000.000,00	172,14

5.1.2.1.5.3 Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Rp,00

Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dianggarkan sebesar Rp33.949.808.000,00 dengan realisasi sebesar Rp33.949.808.000,00 atau 100%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp20.369.884.800,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp13.579.923.200,00 atau 66,67% dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2023 (Rp)	%	2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1 Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	33.949.808.000,00	33.949.808.000,00	100,00	20.369.884.800,00	13.579.923.200,00	66,67
Jumlah	33.949.808.000,00	33.949.808.000,00	100,00	20.369.884.800,00	13.579.923.200,00	66,67

Rincian Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik:

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2023 (Rp)	%	2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	11.885.144.000,00	11.885.144.000,00	100,00	7.131.086.400,00	4.754.057.600,00	66,67
Partai Kebangkitan Bangsa	5.407.092.000,00	5.407.092.000,00	100,00	3.244.255.200,00	2.162.836.800,00	66,67
Partai Gerakan Indonesia Raya	3.245.496.000,00	3.245.496.000,00	100,00	1.947.297.600,00	1.298.198.400,00	66,67
Partai Keadilan Sejahtera	2.473.920.000,00	2.473.920.000,00	100,00	1.484.352.000,00	989.568.000,00	66,67
Partai Golongan Karya	3.410.108.000,00	3.410.108.000,00	100,00	2.046.064.800,00	1.364.043.200,00	66,67
Partai Demokrat	1.908.502.000,00	1.908.502.000,00	100,00	1.145.101.200,00	763.400.800,00	66,67
Partai Amanat Nasional	1.729.332.000,00	1.729.332.000,00	100,00	1.037.599.200,00	691.732.800,00	66,67
Partai Persatuan Pembangunan	2.216.392.000,00	2.216.392.000,00	100,00	1.329.835.200,00	886.556.800,00	66,67
Partai Nasional Demokrat	1.673.822.000,00	1.673.822.000,00	100,00	1.004.293.200,00	669.528.800,00	66,67
Jumlah	33.949.808.000,00	33.949.808.000,00	100,00	20.369.884.800,00	13.579.923.200,00	66,67

5.1.2.1.6. Belanja Bantuan Sosial Rp,00

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah **TIDAK ADA** Belanja Bantuan Sosial.

5.1.2.2. BELANJA MODAL Rp186.365.000,00

Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp201.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp186.365.000,00 atau 92,72%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp226.241.350,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp39.876.350,00 atau % dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2023 (Rp)	%	2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1 Belanja Modal Tanah	-	-	-	-	-	-
2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	201.000.000,00	186.365.000,00	92,72	226.241.350,00	(39.876.350,00)	(17,63)
3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-	-	-	-
4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-	-	-
5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-	-
6 Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	-	-	-	-
Jumlah	201.000.000,00	186.365.000,00	92,72	226.241.350,00	(39.876.350,00)	(17,63)

5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah Rp,00

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah **TIDAK ADA** Belanja Modal Tanah.

5.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp186.365.000,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin dianggarkan sebesar Rp201.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp186.365.000,00 atau 92,72%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp, Rp226.241.350,00 mengalami **penurunan** sebesar 39.876.350,00 atau 17,63% dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2023 (Rp)	%	2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1 Belanja Modal Alat Besar	-	-	-	-	-	-
2 Belanja Modal Alat Angkutan	-	-	-	-	-	-
3 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	-	-	-	-	-	-
4 Belanja Modal Alat Pertanian	-	-	-	-	-	-
5 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	50.000.000,00	39.905.000,00	79,81	29.826.350,00	10.078.650,00	33,79
6 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	44.380.000,00	42.000.000,00	94,64	46.553.000,00	(4.553.000,00)	(9,78)
7 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	-	-	-	-	-	-
8 Belanja Modal Alat Laboratorium	-	-	-	-	-	-
9 Belanja Modal Alat Persenjataan	-	-	-	-	-	-
10 Belanja Modal Komputer	106.620.000,00	104.460.000,00	97,97	149.862.000,00	(45.402.000,00)	(30,30)
11 Belanja Modal Alat Eksplorasi	-	-	-	-	-	-
12 Belanja Modal Alat Pengeboran	-	-	-	-	-	-
13 Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	-	-	-	-	-	-
14 Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	-	-	-	-	-	-
15 Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	-	-	-	-	-	-
16 Belanja Modal Alat Peraga	-	-	-	-	-	-
17 Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi	-	-	-	-	-	-
18 Belanja Modal Rambu-rambu	-	-	-	-	-	-
19 Belanja Modal Peralatan Olahraga	-	-	-	-	-	-
20 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	-	-	-	-	-	-

21	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	201.000.000,00	186.365.000,00	92,72	226.241.350,00	(39.876.350,00)	(17,63)

5.1.2.2.2.1 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp39.905.000,00

Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga dianggarkan sebesar Rp50.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp39.905.000,00 atau 79,81%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp29.826.350,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp10.078.650,00 atau 33,79% dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2023 (Rp)	%	2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%	
1	Belanja Modal Alat Kantor	-	-	-	-	-	
2	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	50.000.000,00	39.905.000,00	79,81	29.826.350,00	10.078.650,00	33,79
3	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	50.000.000,00	39.905.000,00	79,81	29.826.350,00	10.078.650,00	33,79

5.1.2.2.2.2 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Rp42.000.000,00

Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar dianggarkan sebesar Rp44.380.000,00 dengan realisasi sebesar Rp42.000.000,00 atau 94,64%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp46.553.000,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp4.553.000,00 atau 9,78% dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2023 (Rp)	%	2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%	
1	Belanja Modal Alat Studio	44.380.000,00	42.000.000,00	94,64	46.553.000,00	(4.553.000,00)	(9,78)
2	Belanja Modal Alat Komunikasi	-	-	-	-	-	-
3	Belanja Modal Peralatan Pemancar	-	-	-	-	-	-
4	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	44.380.000,00	42.000.000,00	94,64	46.553.000,00	(4.553.000,00)	(9,78)

5.1.2.2.2.3 Belanja Modal Komputer Rp104.460.000,00

Belanja Modal Komputer dianggarkan sebesar Rp106.620.000,00 dengan realisasi sebesar Rp104.460.000,00 atau 97,97%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp149.862.000,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp45.402.000,00 atau 30,30% dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2023 (Rp)	%	2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%	
1	Belanja Modal Komputer Unit	106.620.000,00	104.460.000,00	97,97	149.862.000,00	(45.402.000,00)	(30,30)
2	Belanja Modal Peralatan Komputer	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	106.620.000,00	104.460.000,00	97,97	149.862.000,00	(45.402.000,00)	(30,30)

5.2. PENJELASAN POS-POS NERACA

5.2.1. ASET Rp16.993.894.995,86

Total Aset sebesar Rp16.993.894.995,86 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp17.281.713.958,68 mengalami penurunan sebesar Rp287.818.962,82 atau 1,66%. Jumlah tersebut terdiri atas Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Aset Lainnya dengan rincian sebagai berikut :

	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1 Aset Lancar	27.110.311,78	22.076.488,50
2 Investasi Jangka Panjang	-	-
3 Aset Tetap	16.810.222.786,65	17.173.518.136,85
4 Dana Cadangan	-	-
5 Aset Lainnya	156.561.897,43	86.119.333,33
Jumlah	16.993.894.995,86	17.281.713.958,68

5.2.1.1. ASET LANCAR Rp27.110.311,78

Aset Lancar sebesar Rp27.110.311,78 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp22.076.488,50 mengalami penurunan sebesar Rp5.033.823,28 atau 22,80% dengan rincian sebagai berikut :

	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1 Kas dan Setara Kas	-	-
2 Investasi Jangka Pendek	-	-
3 Piutang Pajak Daerah	-	-
4 Piutang Retribusi Daerah	-	-
5 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-
6 Piutang Lain-lain PAD yang Sah	-	-
7 Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	-
8 Piutang Transfer Antar Daerah	-	-
9 Piutang Lainnya	-	-
10 Penyisihan Piutang	-	-
11 Beban Dibayar Dimuka	18.424.811,78	18.379.488,50
12 Persediaan	8.685.500,00	3.697.000,00
Jumlah	27.110.311,78	22.076.488,50

5.2.1.1.1. Kas dan Setara Kas Rp,00

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah **TIDAK ADA** Kas dan Setara Kas.

5.2.1.1.2. Investasi Jangka Pendek Rp,00

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah **TIDAK ADA** Investasi Jangka Pendek.

5.2.1.1.3. Piutang Pajak Daerah Rp,00

5.2.1.1.4. Piutang Retribusi Daerah Rp,00

5.2.1.1.5. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp,00

5.2.1.1.6. Piutang Lain-lain PAD yang Sah Rp,00

5.2.1.1.7. Piutang Transfer Pemerintah Pusat Rp,00

5.2.1.1.8. Piutang Transfer Antar Daerah Rp,00**5.2.1.1.9. Piutang Lainnya Rp,00****5.2.1.1.10. Penyisihan Piutang Rp,00**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah **TIDAK ADA** Piutang.

5.2.1.1.11. Beban Dibayar Dimuka Rp18.424.811,78

Beban Dibayar Dimuka sebesar Rp18.424.811,78, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp18.379.488,50 mengalami **kenaikan** sebesar Rp45.323,28 atau 0,25% dengan rincian sebagai berikut:

	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1 Beban Dibayar Dimuka	18.424.811,78	18.379.488,50
2 Beban Dibayar Dimuka-Sewa	-	-
Jumlah	18.424.811,78	18.379.488,50

5.2.1.1.11.1 Beban Dibayar Dimuka Rp18.424.811,78

Beban Dibayar Dimuka sebesar Rp18.424.811,78, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp18.379.488,50 mengalami **kenaikan** sebesar Rp45.323,28 atau 0,25% dengan rincian sebagai berikut:

	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1 Beban Dibayar Dimuka	18.424.811,78	18.379.488,50
Jumlah	18.424.811,78	18.379.488,50

5.2.1.1.12. Persediaan Rp8.685.500,00

Persediaan sebesar Rp8.685.500,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp3.697.000,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp4.988.500,00,00 atau 134,93% dengan rincian sebagai berikut :

	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1 Barang Pakai Habis	8.685.500,00	3.697.000,00
2 Barang Tak Habis Pakai	-	-
3 Barang Bekas Pakai	-	-
Jumlah	8.685.500,00	3.697.000,00

5.3.1.1.12.1 Barang Pakai Habis Rp8.685.500,00

Barang Pakai Habis sebesar Rp8.685.500,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp3.697.000,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp4.988.500,00 atau 134,93% dengan rincian sebagai berikut :

	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1 Bahan	-	-
2 Suku Cadang	-	-
3 Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	8.685.500,00	3.697.000,00
4 Obat-obatan	-	-
5 Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	-	-
6 Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga	-	-
7 Natura dan Pakan	-	-
8 Persediaan Penelitian	-	-
9 Persediaan dalam Proses	-	-
Jumlah	8.685.500,00	3.697.000,00

5.2.1.2. INVESTASI JANGKA PANJANG Rp,00**5.2.1.2.1. Investasi Jangka Panjang Non Permanen Rp,00****5.2.1.2.2. Investasi Jangka Panjang Non Permanen Rp,00**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah **TIDAK ADA** Investasi Jangka Panjang.

5.2.1.3. ASET TETAP Rp16.810.222.786,65

Aset Tetap sebesar Rp16.810.222.786,65, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp17.173.518.136,85 mengalami **penurunan** sebesar Rp363.295.350,20 atau 2,11% dengan rincian sebagai berikut:

	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1 Tanah	12.011.143.000,00	12.011.143.000,00
2 Peralatan dan Mesin	9.480.074.082,00	9.271.194.082,00
3 Gedung dan Bangunan	6.719.620.308,00	6.719.620.308,00
4 Jalan,Irigasi, dan Jaringan	-	-
5 Aset Tetap Lainnya	80.619.400,00	80.619.400,00
6 Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-
7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(11.481.234.003,35)	(10.909.058.653,15)
Jumlah	16.810.222.786,65	17.173.518.136,85

Rincian mutasi aset tetap terdiri dari : **(pengisian menggunakan kertas kerja aset tetap terlampir)**

Saldo Awal	Rp28.082.576.790,00
Penambahan	
Belanja Modal	Rp 186.365.000,00
Belanja Barang/Jasa	Rp 2.550.000,00
Hibah	Rp 0,00
Mutasi Masuk	Rp 19.965.000,00
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp 212.384.226,00
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp 68.000.000,00
Koreksi	Rp 0,00
Jumlah	Rp 489.264.226,00
Berkurang	
Ekstrakontable	Rp 0,00
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp 212.384.226,00
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp 0,00
Mutasi Keluar	Rp 68.000.000,00
Koreksi	Rp 0,00
Jumlah	Rp 280.384.226,00
Grand Total	Rp28.291.456.790,00

5.2.1.3.1. Tanah Rp12.011.143.000,00

Tanah sebesar Rp12.011.143.000,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp12.011.143.000,00 tidak mengalami **kenaikan/penurunan** dengan rincian sebagai berikut :

	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1 Tanah Persil	12.011.143.000,00	12.011.143.000,00
2 Tanah Non Persil	-	-
3 Lapangan	-	-
Jumlah	12.011.143.000,00	12.011.143.000,00

Tidak ada mutasi tanah yang menambah atau mengurangi saldo tanah di tahun 2023.

5.2.1.3.2. Peralatan dan Mesin Rp9.480.074.082,00

Peralatan dan Mesin sebesar Rp9.480.074.082,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp9.271.194.082,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp208.880.000,00 atau 2,25% dengan rincian sebagai berikut :

	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1 Alat Besar	689.909.226,00	640.150.000,00
2 Alat Angkutan	3.084.658.400,00	3.084.658.400,00
3 Alat Bengkel dan Alat Ukur	-	-
4 Alat Pertanian	-	-
5 Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.107.492.666,00	3.055.346.892,00
6 Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	765.478.000,00	761.478.000,00
7 Alat Kedokteran dan Kesehatan	-	-
8 Alat Laboratorium	-	-
9 Alat Persenjataan	-	-
10 Komputer	1.832.535.790,00	1.729.560.790,00
11 Alat Eksplorasi	-	-
12 Alat Pengeboran	-	-
13 Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	-	-
14 Alat Bantu Eksplorasi	-	-
15 Alat Keselamatan Kerja	-	-
16 Alat Peraga	-	-
17 Peralatan Proses/Produksi	-	-
18 Rambu-rambu	-	-
19 Peralatan Olahraga	-	-
Jumlah	9.480.074.082,00	9.271.194.082,00

Rincian mutasi peralatan dan mesin terdiri dari : **(pengisian menggunakan kertas kerja aset tetap terlampir)**

Saldo Awal	Rp 9.271.194.082,00
Penambahan	
Belanja Modal	Rp 186.365.000,00
Belanja Barang/Jasa	Rp 2.550.000,00
Hibah	Rp
Mutasi Masuk	Rp 19.965.000,00
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp 110.734.226,00
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp 68.000.000,00
Koreksi	Rp
Jumlah	Rp 387.614.226,00

Berkurang

Ekstrakomtabel	Rp	
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp	110.734.226,00
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp	
Mutasi Keluar	Rp	68.000.000,00
Koreksi	Rp	
Jumlah	Rp	178.734.226,00

Grand Total Rp 9.480.074.082,00

5.2.1.3.2.1 Alat Besar Rp689.909.226,00

Alat Besar sebesar Rp689.909.226,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp640.150.000,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp49.759.226,00 atau 7,77% dengan rincian sebagai berikut :

	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1 Alat Besar Darat	-	-
2 Alat Besar Apung	-	-
3 Alat Bantu	689.909.226,00	640.150.000,00
Jumlah	689.909.226,00	640.150.000,00

5.2.1.3.2.2 Alat Angkutan Rp 3.084.658.400,00

Alat Angkutan sebesar Rp3.084.658.400,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp3.084.658.400,00 tidak mengalami **kenaikan/penurunan** rincian sebagai berikut :

	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1 Alat Angkutan Darat Bermotor	3.084.658.400,00	3.084.658.400,00
2 Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	-	-
3 Alat Angkutan Apung Bermotor	-	-
4 Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	-	-
5 Alat Angkutan Bermotor Udara	-	-
Jumlah	3.084.658.400,00	3.084.658.400,00

5.2.1.3.2.3 Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp3.107.492.666,00

Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp3.107.492.666,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp3.055.346.892,00 mengalami **kenaikan/penurunan*** sebesar Rp,00 atau % dengan rincian sebagai berikut :

	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1 Alat Kantor	500.311.440,00	476.311.440,00
2 Alat Rumah Tangga	2.366.309.226,00	2.287.688.452,00
3 Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	240.872.000,00	291.347.000,00
Jumlah	3.107.492.666,00	3.055.346.892,00

5.2.1.3.2.4 Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Rp765.478.000,00

Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebesar Rp765.478.000,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp761.478.000,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp4.000.000,00 atau 0,52% dengan rincian sebagai berikut :

	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1 Alat Studio	673.778.000,00	669.778.000,00
2 Alat Komunikasi	91.700.000,00	91.700.000,00
3 Peralatan Pemancar	-	-
4 Peralatan Komunikasi Navigasi	-	-
Jumlah	765.478.000,00	761.478.000,00

5.2.1.3.2.5 Komputer Rp1.832.535.790,00

Komputer sebesar Rp1.832.535.790,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.729.560.790,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp102.975.000,00 atau 5,95% dengan rincian sebagai berikut :

	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1 Komputer Unit	1.232.394.949,00	1.131.969.949,00
2 Peralatan Komputer	600.140.841,00	597.590.841,00
Jumlah	1.832.535.790,00	1.729.560.790,00

5.2.1.3.3. Gedung dan Bangunan Rp6.719.620.308,00

Gedung dan Bangunan sebesar Rp6.719.620.308,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 6.719.620.308,00 tidak mengalami **kenaikan/penurunan** dengan rincian sebagai berikut :

	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1 Bangunan Gedung	6.587.970.308,00	6.587.970.308,00
2 Monumen	-	-
3 Bangunan Menara	-	-
4 Tugu Titik Kontrol/Pasti	131.650.000,00	131.650.000,00
Jumlah	6.719.620.308,00	6.719.620.308,00

Rincian mutasi gedung dan bangunan terdiri dari : **(pengisian menggunakan kertas kerja aset tetap terlampir)**

Saldo Awal	Rp 6.719.620.308,00
Penambahan	
Belanja Modal	Rp
Belanja Barang/Jasa	Rp
Hibah	Rp
Mutasi Masuk	Rp
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp 101.650.000,00
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp
Koreksi	Rp
Jumlah	Rp 101.650.000,00
Berkurang	
Ekstrakomtabel	Rp
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp 101.650.000,00
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp
Mutasi Keluar	Rp
Koreksi	Rp
Jumlah	Rp 101.650.000,00
Grand Total	Rp 6.719.620.308,00

5.2.1.3.3.1 Bangunan Gedung Rp6.587.970.308,00

Bangunan Gedung sebesar Rp6.587.970.308,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp6.587.970.308,00 tidak mengalami **kenaikan/penurunan** dengan rincian sebagai berikut :

	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1 Bangunan Gedung Tempat Kerja	6.587.970.308,00	6.587.970.308,00
2 Bangunan Gedung Tempat Tinggal	-	-
Jumlah	6.587.970.308,00	6.587.970.308,00

5.2.1.3.3.2 Tugu Titik Kontrol/Pasti Rp131.650.000,00

Tugu Titik Kontrol/Pasti sebesar Rp131.650.000,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp131.650.000,00 tidak mengalami **kenaikan/penurunan** dengan rincian sebagai berikut :

	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1 Tugu/Tanda Batas	131.650.000,00	131.650.000,00
Jumlah	131.650.000,00	131.650.000,00

5.2.1.3.4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan Rp,00

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah **TIDAK ADA** Jalan, Irigasi, dan Jaringan.

5.2.1.3.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya sebesar Rp80.619.400,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp80.619.400,00 tidak mengalami **kenaikan/penurunan** dengan rincian sebagai berikut :

	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1 Bahan Perpustakaan	80.619.400,00	80.619.400,00
2 Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	-	-
3 Hewan	-	-
4 Biota Perairan	-	-
5 Tanaman	-	-
6 Barang Koleksi Non Budaya	-	-
7 Aset Tetap Dalam Renovasi	-	-
Jumlah	80.619.400,00	80.619.400,00

Rincian mutasi aset tetap lainnya terdiri dari : **(pengisian menggunakan kertas kerja aset tetap terlampir)**

Saldo Awal	Rp	80.619.400,00
Penambahan		
Belanja Modal	Rp	0,00
Belanja Barang/Jasa	Rp	0,00
Hibah	Rp	0,00
Mutasi Masuk	Rp	0,00
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp	0,00
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp	0,00
Koreksi	Rp	0,00
Jumlah	Rp	0,00
Berkurang		
Ekstrakomtabel	Rp	0,00
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp	0,00

Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp	0,00
Mutasi Keluar	Rp	0,00
Koreksi	Rp	0,00
Jumlah	Rp	0,00
Grand Total	Rp	80.619.400,00

5.2.1.3.4.1 Bahan Perpustakaan Rp80.619.400,00

Bahan Perpustakaan sebesar Rp80.619.400,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp80.619.400,00 tidak mengalami **kenaikan/penurunan** dengan rincian sebagai berikut :

	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1 Bahan Perpustakaan Tercetak	80.619.400,00	80.619.400,00
2 Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	-	-
3 Kartografi, Naskah dan Lukisan	-	-
4 Musik	-	-
5 Karya Grafika (Graphic Material)	-	-
6 Three Dimensional Artifacts and Realita	-	-
7 Tarscalt	-	-
Jumlah	80.619.400,00	80.619.400,00

5.2.1.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp,00

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah **TIDAK ADA** Konstruksi Dalam Pengerjaan.

5.2.1.3.7. Akumulasi Penyusutan Rp11.481.234.003,35

Akumulasi Penyusutan sebesar Rp11.481.234.003,35, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp10.909.058.653,15 mengalami **kenaikan** sebesar Rp572.175.350,20 atau 5,24% dengan rincian sebagai berikut :

	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(8.735.995.927,34)	(8.298.207.556,83)
2 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(2.745.238.076,01)	(2.610.851.096,32)
3 Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-	-
4 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-
Jumlah	(11.481.234.003,35)	(10.909.058.653,15)

5.2.1.3.7.1 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Rp8.735.995.927,34

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp8.735.995.927,34, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp8.298.207.556,83 mengalami **kenaikan** sebesar Rp437.788.370,51 atau 5,28% dengan rincian sebagai berikut :

	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1 Akumulasi Penyusutan Alat Besar	(689.909.226,00)	(640.150.000,00)
2 Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	(2.940.401.525,00)	(2.824.014.525,00)
3 Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	-	-
4 Akumulasi Penyusutan Alat Pertanian	-	-
5 Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	(2.867.738.480,10)	(2.819.387.148,09)

6	Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	(692.737.766,67)	(623.727.166,67)
7	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	-	-
8	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium	-	-
9	Akumulasi Penyusutan Alat Persenjataan	-	-
10	Akumulasi Penyusutan Komputer	(1.545.208.929,57)	(1.390.928.717,07)
11	Akumulasi Penyusutan Alat Eksplorasi	-	-
12	Akumulasi Penyusutan Alat Pengeboran	-	-
13	Akumulasi Penyusutan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	-	-
14	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu Eksplorasi	-	-
15	Akumulasi Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	-	-
16	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga	-	-
17	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi	-	-
18	Akumulasi Penyusutan Rambu-rambu	-	-
19	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga	-	-
	Jumlah	(8.735.995.927,34)	(8.298.207.556,83)

5.2.1.3.7.1.1 Akumulasi Penyusutan Alat Besar Rp689.909.226,00

Akumulasi Penyusutan Alat Besar sebesar Rp689.909.226,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp640.150.000,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp49.759.226,00 atau 7,77% dengan rincian sebagai berikut :

	2023 (Rp)	2022 (Rp)	
1	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Tractor	-	-
2	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Grader	-	-
3	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat- Excavator	-	-
4	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Pile Driver	-	-
6	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Hauler	-	-
7	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Asphalt Equipment	-	-
5	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Compacting Equipment	-	-
8	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Aggregate and Concrete Equipment	-	-
9	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Loader	-	-
10	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Alat Pengangkat	-	-
11	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Mesin Proses	-	-
12	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	-	-
13	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Apung-Dreger	-	-
14	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Apung- Floating Excavator	-	-
15	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Apung- Amphibi Dredger	-	-
16	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Apung-Kapal Tarik	-	-
17	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Apung-Mesin	-	-
18	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Apung-Alat Besar Apung Lainnya	-	-
19	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Alat Penarik	-	-
21	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Feeder	-	-

20	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Compressor	-	-
22	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Electric Generating Set	(640.150.000,00)	(640.150.000,00)
25	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Pompa	-	-
23	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Mesin Bor	-	-
24	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan	-	-
26	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Alat Pengolahan Air Kotor	-	-
27	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Pembangkit Uap Air Panas/Steam Generator	-	-
28	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Air Port Maintenance Equipment/Alat Bantu Penerbangan	-	-
29	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Mesin Tatoo	-	-
30	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Perlengkapan Kebakaran Hutan	-	-
31	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Peralatan Selam	(49.759.226,00)	-
32	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Peralatan SAR Mountenering	-	-
33	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Peralatan Intelijen	-	-
34	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	-	-
	Jumlah	(689.909.226,00)	(640.150.000,00)

5.2.1.3.7.1.2 Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Rp2.940.401.525,00

Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan sebesar Rp2.940.401.525,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp2.824.014.525,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp116.387.000,00 atau 4,12% dengan rincian sebagai berikut :

	2023 (Rp)	2022 (Rp)	
1	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	(285.297.750,00)	(237.748.125,00)
2	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	(2.551.141.775,00)	(2.482.304.400,00)
3	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	-	-
4	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	(103.962.000,00)	(103.962.000,00)
5	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	-	-
6	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat	-	-
7	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Tempur	-	-
8	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel	-	-
9	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	-	-
10	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	-	-
11	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak	-	-
12	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel Tak Bermotor	-	-
13	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya	-	-
14	Akumulasi Penyusutan Alat Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang	-	-
15	Akumulasi Penyusutan Alat Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	-	-

16	Akumulasi Penyusutan Alat Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	-	-
17	Akumulasi Penyusutan Alat Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Militer	-	-
18	Akumulasi Penyusutan Alat Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	-	-
19	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Barang	-	-
20	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang	-	-
21	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus	-	-
22	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya	-	-
23	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Bermotor Udara-Kapal Terbang	-	-
24	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Bermotor Udara-Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya	-	-
	Jumlah	(2.940.401.525,00)	(2.824.014.525,00)

5.2.1.3.7.1.3 Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp2.867.738.480,10

Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp2.867.738.480,10, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp2.819.387.148,09 mengalami **kenaikan** sebesar Rp48.351.332,01 atau 1,71% dengan rincian sebagai berikut :

	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1 Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Ketik	(1.700.000,00)	(1.700.000,00)
2 Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah	(1.137.300,00)	(682.380,00)
3 Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	(100.040.000,00)	(100.040.000,00)
4 Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	(194.664.058,25)	(190.890.229,25)
6 Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	(164.157.180,84)	(160.349.808,50)
7 Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebelair	(462.014.981,66)	(398.454.211,67)
5 Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu	(11.930.000,00)	(11.930.000,00)
8 Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat	-	-
9 Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	(1.339.730.000,00)	(1.274.953.000,00)
10 Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	(600.000,00)	(600.000,00)
11 Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	(291.352.083,35)	(328.899.642,67)
12 Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	(59.540.876,00)	(59.540.876,00)
13 Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	(221.722.000,00)	(272.197.000,00)
14 Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat	-	-
15 Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	-	-
16 Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat	(19.150.000,00)	(19.150.000,00)
17 Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	-	-

18	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruang Pejabat	-	-
19	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	-	-
Jumlah		(2.867.738.480,10)	(2.819.387.148,09)

5.2.1.3.7.1.4 Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Rp692.737.766,67

Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebesar Rp692.737.766,67, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp623.727.166,67 mengalami **kenaikan** sebesar Rp69.010.600,00 atau 11,06% dengan rincian sebagai berikut :

	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1 Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio	(470.295.000,00)	(429.015.000,00)
2 Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	(130.742.766,67)	(103.012.166,67)
3 Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Gambar	-	-
4 Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Cetak	-	-
5 Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	-	-
6 Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Alat Studio Lainnya	-	-
7 Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	(91.700.000,00)	(91.700.000,00)
8 Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio SSB	-	-
9 Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio HF/FM	-	-
10 Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio VHF	-	-
11 Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio UHF	-	-
12 Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Sosial	-	-
13 Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat- Alat Sandi	-	-
14 Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Khusus	-	-
15 Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Digital dan Konvensional	-	-
16 Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat	-	-
17 Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya	-	-
18 Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar MF/MW	-	-
19 Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar HF/SW	-	-
20 Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar VHF/FM	-	-
21 Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar UHF	-	-
22 Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar SHF	-	-
23 Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena MF/MW	-	-
24 Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena HF/SW	-	-
25 Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena VHF/FM	-	-
26 Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena UHF	-	-
27 Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena SHF/Parabola	-	-

28	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Translator VHF/VHF	-	-
29	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Translator UHF/UHF	-	-
30	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Translator VHF/UHF	-	-
31	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Translator UHF/VHF	-	-
32	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Microwave FPU	-	-
33	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Microwave Terrestrial	-	-
34	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Microwave TVRO	-	-
35	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Dummy Load	-	-
36	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Switcher Antena	-	-
37	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Switcher/Menara Antena	-	-
38	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Feeder	-	-
39	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Humidity Control	-	-
40	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Program Input Equipment	-	-
41	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Penerima VHF	-	-
42	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar LF	-	-
43	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Unit Pemancar MF+HF	-	-
44	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar MF+HF	-	-
45	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima	-	-
46	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima LF	-	-
47	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima MF	-	-
48	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima HF	-	-
49	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima MF+HF	-	-
50	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima VHF	-	-
51	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima UHF	-	-
52	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima SHF	-	-
53	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima LF	-	-
54	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF	-	-
55	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima HF	-	-
56	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF+HF	-	-
57	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima VHF	-	-
58	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima UHF	-	-
59	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima SHF	-	-
60	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Rendah	-	-

61	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Tinggi	-	-
62	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima dan Pengirim Gambar ke Permukaan	-	-
63	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Perlengkapan Radio	-	-
64	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga	-	-
65	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar Lainnya	-	-
66	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi Instrumen Landing System	-	-
67	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komunikasi Navigasi-Very High Frequence Omni Range (VOR)	-	-
68	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komunikasi Navigasi-Distance Measuring Equipment (DME)	-	-
69	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komunikasi Navigasi-Radar	-	-
70	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komunikasi Navigasi-Alat Pengatur Telekomunikasi	-	-
71	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi	-	-
72	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya	-	-
Jumlah		(692.737.766,67)	(623.727.166,67)

5.2.1.3.7.1.5 Akumulasi Penyusutan Komputer Rp1.545.208.929,57

Akumulasi Penyusutan Komputer sebesar Rp1.545.208.929,57, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.390.928.717,07 mengalami **kenaikan** sebesar Rp 154.280.212,50 atau 11,09% dengan rincian sebagai berikut :

	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1 Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Komputer Jaringan	-	-
2 Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	(987.897.719,82)	(853.343.157,32)
3 Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	-	-
4 Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	(1.600.000,00)	(1.600.000,00)
5 Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	(272.680.000,00)	(272.680.000,00)
6 Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	(258.178.084,75)	(238.505.559,75)
7 Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	(24.853.125,00)	(24.800.000,00)
8 Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	-	-
Jumlah	(1.545.208.929,57)	(1.390.928.717,07)

5.2.1.3.7.2. Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan Rp2.745.238.076,01

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.745.238.076,01, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp2.610.851.096,32 mengalami **penurunan** sebesar Rp134.386.979,69 atau 5,15% dengan rincian sebagai berikut :

	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1 Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(2.702.178.076,01)	(2.570.424.096,32)
2 Akumulasi Penyusutan Monumen	-	-

3	Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara	-	-
4	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas	(43.060.000,00)	(40.427.000,00)
	Jumlah	(2.745.238.076,01)	(2.610.851.096,32)

5.2.1.3.7.2.1 Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Rp2.702.178.076,01

Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung sebesar Rp2.702.178.076,01, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp2.610.851.096,32 mengalami **kenaikan** sebesar 131.753.979,69 atau 5,13% dengan rincian sebagai berikut :

	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	(2.661.814.476,01)	(2.532.855.616,32)
2	(8.047.620,00)	(7.153.440,00)
3	-	-
4	-	-
5	-	-
6	-	-
7	-	-
8	-	-
9	-	-
10	-	-
11	-	-
12	-	-
13	-	-
14	-	-
15	-	-
16	-	-
17	-	-
18	-	-
19	-	-
20	-	-
21	-	-
22	-	-
23	-	-
24	-	-
25	-	-
26	-	-

27	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	-	-
28	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Industri	-	-
29	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan	-	-
30	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	-	-
31	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peralatan Geofisika	-	-
32	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	(32.315.980,00)	(30.415.040,00)
33	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir	-	-
34	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pabrik	-	-
35	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Stasiun Bus	-	-
36	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Taman	-	-
37	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	-	-
38	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	-	-
39	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II	-	-
40	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III	-	-
41	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/ Tempat Peristirahatan	-	-
42	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama	-	-
43	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Hotel	-	-
44	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Motel	-	-
45	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Flat/Rumah Susun	-	-
46	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Dalam Proses Penggolongan	-	-
47	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Panti Asuhan	-	-
48	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Apartemen	-	-
49	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Tidak Bersusun	-	-
50	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	-	-
	Jumlah	(2.702.178.076,01)	(2.570.424.096,32)

5.2.1.3.7.2.2 Akumulasi Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti Rp43.060.000,00

Akumulasi Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti sebesar Rp43.060.000,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp40.427.000,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp2.633.000,00 atau 6,51% dengan rincian sebagai berikut :

	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1 Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Administrasi	(2.400.000,00)	(40.427.000,00)
2 Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas-Tugu/Tanda Jaring Kontrol Geodesi	-	-

3	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas-Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	(40.660.000,00)	-
4	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas-Pagar	-	-
5	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Lainnya	-	-
Jumlah		(43.060.000,00)	(40.427.000,00)

5.2.1.4. Dana Cadangan Rp,00

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah **TIDAK ADA** Dana Cadangan.

5.2.1.5. Aset Lainnya Rp156.561.897,43

Aset Lainnya sebesar Rp156.561.897,43, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp86.119.333,33 mengalami **kenaikan** sebesar Rp70.442.564,10 atau 81,80% dengan rincian sebagai berikut :

	2023 (Rp)	2022 (Rp)	
1	Tagihan Jangka Panjang	-	-
2	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-
3	Aset Tak Berwujud	311.500.000,00	186.500.000,00
4	Aset Lain-lain	1.586.232.484,00	1.673.917.484,00
5	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(158.474.102,57)	(104.966.666,67)
6	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(1.582.696.484,00)	(1.669.331.484,00)
7	Kas yang Dibatasi Penggunaannya	-	-
8	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	-	-
Jumlah		156.561.897,43	86.119.333,33

5.2.1.5.1. Tagihan Jangka Panjang Rp,00

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah **TIDAK ADA** Tagihan Jangka Panjang.

5.2.1.5.2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga Rp,00

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah **TIDAK ADA** Kemitraan dengan Pihak Ketiga.

5.2.1.5.3. Aset Tidak Berwujud Rp311.500.000,00

Aset Tidak Berwujud sebesar Rp311.500.000,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp186.500.000,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp125.000.000,00 atau 67,02% dengan rincian sebagai berikut :

	2023 (Rp)	2022 (Rp)	
1	Goodwill	-	-
2	Lisensi dan Franchise	-	-
3	Hak Cipta	-	-
4	Hak Paten	-	-
5	Software	311.500.000,00	186.500.000,00
6	Kajian	-	-
7	Aset Tidak Berwujud Yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya	-	-
8	Aset Tidak Berwujud Dalam Pengerjaan	-	-
9	Aset Tidak Berwujud Lainnya	-	-
Jumlah		311.500.000,00	186.500.000,00

5.2.1.5.4. Aset Lain-Lain 1.586.232.484,00

Aset Lain-Lain sebesar Rp1.586.232.484,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.673.917.484,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp87.685.000,00 atau 5,24% dengan rincian sebagai berikut :

	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1 Aset Rusak Berat/Usang	1.586.232.484,00	1.673.917.484,00
2 Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	-	-
Jumlah	1.586.232.484,00	1.673.917.484,00

5.2.1.5.5. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Rp158.474.102,57

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar Rp158.474.102,57, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp104.966.666,67 mengalami **penurunan** sebesar Rp53.507.435,90 atau 50,98% dengan rincian sebagai berikut :

	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Lisensi dan Frenchise	-	-
2 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Hak Cipta	-	-
3 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Hak Paten	-	-
4 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Software	(158.474.102,57)	(104.966.666,67)
5 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Kajian	-	-
Jumlah	(158.474.102,57)	(104.966.666,67)

5.2.1.5.6. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Rp1.582.696.484,00

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya sebesar Rp1.582.696.484,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.669.331.484,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp86.635.000,00 atau 5,19% dengan rincian sebagai berikut :

	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1 Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Sewa	-	-
2 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(1.582.696.484,00)	(1.669.331.484,00)
Jumlah	(1.582.696.484,00)	(1.669.331.484,00)

5.2.1.5.7 Kas yang Dibatasi Penggunaannya Rp,00

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah **TIDAK ADA** Kas yang Dibatasi Penggunaannya.

5.2.1.5.8 Dana Treasury Deposit Facility (DTF) Rp,00

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah **TIDAK ADA** Dana Treasury Deposit Facility (DTF).

5.2.2. KEWAJIBAN Rp,00

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah **TIDAK ADA** Kewajiban.

5.2.3. EKUITAS Rp592.679.624.921,14

Ekuitas sebesar Rp592.679.624.921,14 dengan rincian sebagai berikut :

	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1 Ekuitas	17.339.853.646,18	17.281.713.958,68
2 Surplus/Defisit-LO	(610.019.478.567,32)	-
Jumlah	(592.679.624.921,14)	17.281.713.958,68

5.3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan. Dari LO dapat dijelaskan sebagai berikut:

	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1 Pendapatan	-	-	-
2 Beban	610.018.428.567,32	115.758.899.620,29	494.259.528.947,03
Surplus/(Defisit) Operasional	(610.018.428.567,32)	(115.758.899.620,29)	(494.259.528.947,03)
3 Kegiatan Non Operasional	1.050.000,00	-	1.050.000,00
Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa	(610.019.478.567,32)	(115.758.899.620,29)	(494.260.578.947,03)
4 Pos Luar Biasa	-	-	-
Surplus/(Defisit) Laporan Operasional	(610.019.478.567,32)	(115.758.899.620,29)	(494.260.578.947,03)

Penjelasan lebih lanjut mengenai LO Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 sebagai berikut:

5.3.1. PENDAPATAN DAERAH-LO Rp,00

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah **TIDAK ADA** Pendapatan Daerah.

5.3.2. BEBAN DAERAH Rp610.018.428.567,32

Beban Daerah terealisasi sebesar Rp610.018.428.567,32, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp115.758.899.620,29 mengalami **kenaikan** sebesar Rp494.259.528.947,03 atau 426,97% dengan rincian sebagai berikut :

	LRA 2023 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 Beban Operasional	609.487.154.917,00	640.933.962,10	109.660.311,78	610.018.428.567,32	115.758.899.620,29	494.259.528.947,03	426,97
2 Beban Transfer	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	609.487.154.917,00	640.933.962,10	109.660.311,78	610.018.428.567,32	115.758.899.620,29	494.259.528.947,03	426,97

5.3.2.1. BEBAN OPERASIONAL Rp610.018.428.567,32

Beban Operasional terealisasi sebesar Rp610.018.428.567,32, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp115.758.899.620,29 mengalami **kenaikan** sebesar Rp494.259.528.947,03 atau 426,97% dengan rincian sebagai berikut :

	LRA 2023 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 Beban Pegawai	8.810.641.027,00	-	-	8.810.641.027,00	8.153.647.108,00	656.993.919,00	8,06
2 Beban Barang dan Jasa	34.237.705.890,00	22.076.488,50	109.660.311,78	34.150.122.066,72	27.751.711.787,94	6.398.410.278,78	23,06
3 Beban Bunga	-	-	-	-	-	-	-
4 Beban Subsidi	-	-	-	-	-	-	-
5 Beban Hibah	566.438.808.000,00	-	-	566.438.808.000,00	79.078.284.800,00	487.360.523.200,00	616,30
6 Beban Bantuan Sosial	-	-	-	-	-	-	-
7 Beban Penyisihan Piutang	-	-	-	-	-	-	-
8 Beban Penyusutan dan Amortisasi	-	618.857.473,60	-	618.857.473,60	775.255.924,35	(156.398.450,75)	(20,17)
9 Beban Lain-Lain	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	609.487.154.917,00	640.933.962,10	109.660.311,78	610.018.428.567,32	115.758.899.620,29	494.259.528.947,03	426,97

5.3.2.1.1. Beban Pegawai Rp8.810.641.027,00

Beban Pegawai terealisasi sebesar Rp8.810.641.027,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp8.153.647.108,00 mengalami kenaikan sebesar Rp656.993.919,00 atau 8,06% dengan rincian sebagai berikut :

	LRA 2023 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 Beban Gaji dan Tunjangan ASN	3.710.493.236,00	-	-	3.710.493.236,00	3.694.455.365,00	16.037.871,00	0,43
2 Beban Tambahan Penghasilan ASN	4.892.747.791,00	-	-	4.892.747.791,00	4.246.071.743,00	646.676.048,00	15,23
3 Pertimbangan Objektif Berdasarkan Lainnya ASN	207.400.000,00	-	-	207.400.000,00	213.120.000,00	(5.720.000,00)	(2,68)
4 Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	-	-	-	-	-	-	-
5 Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	-	-	-	-	-	-	-
6 Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	-	-	-	-	-	-	-
7 Beban Gaji dan Tunjangan MRP	-	-	-	-	-	-	-
8 Beban Pegawai BOS	-	-	-	-	-	-	-
9 Beban Pegawai BOSP	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	8.810.641.027,00	-	-	8.810.641.027,00	8.153.647.108,00	656.993.919,00	8,06

5.3.2.1.1.1 Beban Gaji dan Tunjangan ASN Rp3.710.493.236,00

Beban Gaji dan Tunjangan ASN terealisasi sebesar Rp3.710.493.236,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp3.694.455.365,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp10.450.767,00 atau 0,28% dengan rincian sebagai berikut :

	LRA 2023 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 Beban Gaji Pokok ASN	2.715.803.100,00	-	-	2.715.803.100,00	2.704.562.160,00	11.240.940,00	0,42
2 Beban Tunjangan Keluarga ASN	262.698.458,00	-	-	262.698.458,00	261.095.186,00	1.603.272,00	0,61
3 Beban Tunjangan Jabatan ASN	126.140.000,00	-	-	126.140.000,00	143.600.000,00	(17.460.000,00)	(12,16)
4 Beban Tunjangan Fungsional ASN	88.480.000,00	-	-	88.480.000,00	60.880.000,00	27.600.000,00	45,34
5 Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	100.003.954,00	-	-	100.003.954,00	97.220.000,00	2.783.954,00	2,86
6 Beban Tunjangan Beras ASN	146.650.500,00	-	-	146.650.500,00	145.709.040,00	941.460,00	0,65
7 Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	16.242.100,00	-	-	16.242.100,00	16.434.662,00	(192.562,00)	(1,17)

8	Beban Pembulatan Gaji ASN	30.800,00	-	-	30.800,00	34.432,00	(3.632,00)	(10,55)
9	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	232.095.907,00	-	-	232.095.907,00	242.656.156,00	(10.560.249,00)	(4,35)
10	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	5.587.104,00	-	-	-	5.565.933,00	(5.565.933,00)	(100,00)
11	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	16.761.313,00	-	-	16.761.313,00	16.697.796,00	63.517,00	0,38
12	Beban Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	-	-	-	-	-	-	-
13	Beban Jaminan Hari Tua ASN	-	-	-	-	-	-	-
14	Beban Tunjangan Khusus*)	-	-	-	-	-	-	-
15	Beban Zakat ASN	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	3.710.493.236,00	-	-	3.704.906.132,00	3.694.455.365,00	10.450.767,00	0,28

5.3.2.1.1.2 Beban Tambahan Penghasilan ASN Rp4.892.747.791,00

Beban Tambahan Penghasilan ASN terealisasi sebesar Rp4.892.747.791,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp4.246.071.743,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp646.676.048,00 atau 15,23% dengan rincian sebagai berikut :

	LRA 2023 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %	
1	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	4.892.747.791,00	-	-	4.892.747.791,00	4.246.071.743,00	646.676.048,00	15,23
2	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	-	-	-	-	-	-	-
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	-	-	-	-	-	-	-
4	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	-	-	-	-	-	-	-
5	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	4.892.747.791,00	-	-	4.892.747.791,00	4.246.071.743,00	646.676.048,00	15,23

5.3.2.1.1.3 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 207.400.000,00

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN terealisasi sebesar Rp207.400.000,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp213.120.000,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp5.720.000,00 atau 2,68% dengan rincian sebagai berikut :

	LRA 2023 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	-	-	-	-	-	-
2	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	-	-	-	-	-	-
3	Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	-	-	-	-	-	-
4	Beban Tunjangan Khusus Guru (TKG)	-	-	-	-	-	-

PNSD

5	Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	-	-	-	-	-	-
6	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	-	-	-	-	-	-
7	Beban Honorarium	207.400.000,00	-	-	207.400.000,00	213.120.000,00	(5.720.000,00) (2,68)
8	Beban Jasa Pengelolaan BMD	-	-	-	-	-	-
Jumlah		207.400.000,00	-	-	207.400.000,00	213.120.000,00	(5.720.000,00) (2,68)

5.3.2.1.2. Beban Barang dan Jasa Rp34.150.122.066,72

Beban Barang dan Jasa terealisasi sebesar Rp34.150.122.066,72, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp27.751.711.787,94 mengalami **kenaikan** sebesar Rp6.398.410.278,78 atau 23,06% dengan rincian sebagai berikut :

	LRA 2023 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Barang	5.930.955.545,00	3.697.000,00	11.235.500,00	5.923.417.045,00	4.461.357.232,00	1.462.059.813,00 32,77
2	Beban Jasa	14.615.371.525,00	18.379.488,50	98.424.811,78	14.535.326.201,72	12.605.272.413,94	1.930.053.787,78 15,31
3	Beban Pemeliharaan	608.258.411,00	-	-	608.258.411,00	619.110.876,00	(10.852.465,00) (1,75)
4	Beban Perjalanan Dinas	13.012.620.409,00	-	-	13.012.620.409,00	9.975.321.266,00	3.037.299.143,00 30,45
5	Beban Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	70.500.000,00	-	-	70.500.000,00	90.650.000,00	(20.150.000,00) (22,23)
6	Beban Barang dan Jasa BOS	-	-	-	-	-	-
7	Beban Barang dan Jasa BOSP	-	-	-	-	-	-
8	Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas	-	-	-	-	-	-
Jumlah		34.237.705.890,00	22.076.488,50	109.660.311,78	34.150.122.066,72	27.751.711.787,94	6.398.410.278,78 23,06

5.3.2.1.2.1 Beban Barang Rp5.923.417.045,00

Beban Barang terealisasi sebesar Rp5.923.417.045,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp4.461.357.232,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp1.462.059.813,00 atau 32,77% dengan rincian sebagai berikut :

	LRA 2023 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Barang Pakai Habis	5.930.955.545,00	3.697.000,00	11.235.500,00	5.923.417.045,00	4.461.357.232,00	1.462.059.813,00 32,77
2	Beban Barang Tak Habis Pakai	-	-	-	-	-	-
3	Beban Barang Bekas Dipakai	-	-	-	-	-	-
4	Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	-	-	-	-	-	-
Jumlah		5.930.955.545,00	3.697.000,00	11.235.500,00	5.923.417.045,00	4.461.357.232,00	1.462.059.813,00 32,77

5.3.2.1.2.2 Beban Jasa Rp14.535.326.201,72

Beban Jasa terealisasi sebesar Rp14.535.326.201,72, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar

Rp12.605.272.413,94 mengalami **kenaikan** sebesar Rp1.930.053.787,78 atau 15,31% dengan rincian sebagai berikut :

	LRA 2023 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 Beban Jasa Kantor	13.901.979.133,00	-	80.000.000,00	13.821.979.133,00	11.882.561.293,00	1.939.417.840,00	16,32
2 Beban Jasa Asuransi	165.842.392,00	18.379.488,50	18.424.811,78	165.797.068,72	125.301.120,94	40.495.947,78	32,32
3 Beban Sewa Tanah	-	-	-	-	10.000.000,00	(10.000.000,00)	(100,00)
4 Beban Sewa Peralatan dan Mesin	195.200.000,00	-	-	195.200.000,00	300.500.000,00	(105.300.000,00)	(35,04)
5 Beban Sewa Gedung dan Bangunan	292.350.000,00	-	-	292.350.000,00	208.950.000,00	83.400.000,00	39,91
6 Beban Sewa Jalan Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-	-	-	-
7 Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	18.200.000,00	(18.200.000,00)	(100,00)
8 Beban Sewa Aset Tidak Berwujud	-	-	-	-	-	-	-
9 Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	-	-	-	-	-	-	-
10 Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	-	-	-	-	-	-	-
11 Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	-	-	-	-	-	-	-
12 Beban Beasiswa Pendidikan PNS	-	-	-	-	-	-	-
13 Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS/PPPK	60.000.000,00	-	-	60.000.000,00	59.760.000,00	240.000,00	0,40
14 Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	-	-	-	-	-	-	-
15 Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	14.615.371.525,00	18.379.488,50	98.424.811,78	14.535.326.201,72	12.605.272.413,94	1.930.053.787,78	15,31

5.3.2.1.2.3 Beban Pemeliharaan Rp608.258.411,00

Beban Pemeliharaan terealisasi sebesar Rp608.258.411,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp619.110.876,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp10.852.465,00 atau 1,75% dengan rincian sebagai berikut :

	LRA 2023 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 Beban Pemeliharaan Tanah	-	-	-	-	-	-	-
2 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	311.061.299,00	-	-	311.061.299,00	344.925.478,00	(33.864.179,00)	(9,82)
3 Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	297.197.112,00	-	-	297.197.112,00	274.185.398,00	23.011.714,00	8,39
4 Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-	-	-	-	-	-	-
5 Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-	-	-
6 Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	608.258.411,00	-	-	608.258.411,00	619.110.876,00	(10.852.465,00)	(1,75)

5.3.2.1.2.4 Beban Perjalanan Dinas Rp13.012.620.409,00

Beban Perjalanan Dinas terealisasi sebesar Rp13.012.620.409,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp9.975.321.266,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp3.037.299.143,00 atau 30,45% dengan rincian sebagai berikut :

	LRA 2023 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.012.620.409,00	-	-	13.012.620.409,00	9.975.321.266,00	3.037.299.143,00	30,45
2 Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	13.012.620.409,00	-	-	13.012.620.409,00	9.975.321.266,00	3.037.299.143,00	30,45

5.3.2.1.2.5 Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp70.500.000,00

Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat terealisasi sebesar Rp70.500.000,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp90.650.000,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp20.150.000,00 atau 22,23% dengan rincian sebagai berikut :

	LRA 2023 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	70.500.000,00	-	-	70.500.000,00	90.650.000,00	(20.150.000,00)	(22,23)
2 Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	70.500.000,00	-	-	70.500.000,00	90.650.000,00	(20.150.000,00)	(22,23)

5.3.2.1.3 Beban Subsidi Rp,00

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah **TIDAK ADA** Beban Subsidi.

5.3.2.1.4 Beban Hibah Rp566.438.808.000,00

Beban Hibah terealisasi sebesar Rp566.438.808.000,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp79.078.284.800,00 mengalami **kenaikan/penurunan*** sebesar Rp487.360.523.200,00 atau 616,30% dengan rincian sebagai berikut :

	LRA 2023 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	416.389.000.000,00	-	-	416.389.000.000,00	16.046.400.000,00	400.342.600.000,00	2.494,91
2 Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-	-	-	-
3 Beban Hibah kepada BUMN	-	-	-	-	-	-	-
4 Beban Hibah kepada BUMD	-	-	-	-	-	-	-
5 Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	116.100.000.000,00	-	-	116.100.000.000,00	42.662.000.000,00	73.438.000.000,00	172,14

6	Beban Hibah Dana BOS	-	-	-	-	-	-	
7	Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	33.949.808.000,00	-	-	33.949.808.000,00	20.369.884.800,00	13.579.923.200,00	66,67
	Jumlah	566.438.808.000,00	-	-	566.438.808.000,00	79.078.284.800,00	487.360.523.200,00	616,30

5.3.2.1.4.1 Beban Hibah Kepada Pemerintah Pusat Rp416.389.000.000,00

Beban Hibah Kepada Pemerintah Pusat terealisasi sebesar Rp416.389.000.000,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp400.342.600.000,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp16.046.400.000,00 atau 2.494,91% dengan rincian sebagai berikut :

	LRA 2023 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %	
1	Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	416.389.000.000	-	-	416.389.000.000,00	16.046.400.000	400.342.600.000,00	2.494,91
2	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	-	-	-	-	-	-	-
3	Beban Hibah Jasa kepada Pemerintah Pusat	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	416.389.000.000,00	-	-	416.389.000.000,00	16.046.400.000,00	400.342.600.000,00	2.494,91

5.3.2.1.4.2 Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Rp116.100.000.000,00

Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia terealisasi sebesar Rp116.100.000.000,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp42.662.000.000,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp73.438.000.000,00 atau 172,14% dengan rincian sebagai berikut :

	LRA 2023 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %	
1	Beban Hibah Uang kepada Badan/Lembaga yang Berbadan Hukum Indonesia	-	-	-	-	-	-	
2	Beban Hibah Barang kepada Badan/Lembaga yang Berbadan Hukum Indonesia	-	-	-	-	-	-	
3	Beban Hibah Jasa kepada Badan/Lembaga yang Berbadan Hukum Indonesia	116.100.000.000,00	-	-	116.100.000.000,00	42.662.000.000,00	73.438.000.000,00	172,14
4	Beban Hibah kepada Koperasi	-	-	-	-	-	-	
5	Beban Hibah kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil	-	-	-	-	-	-	
6	Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah	116.100.000.000,00	-	-	116.100.000.000,00	42.662.000.000,00	73.438.000.000,00	172,14

5.3.2.1.4.3 Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Rp33.949.808.000,00

Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik terealisasi sebesar Rp, 33.949.808.000,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp20.369.884.800,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp13.579.923.200,00 atau 66,67% dengan rincian sebagai berikut :

	LRA 2023 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 Beban Hibah berupa Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	33.949.808.000,00	-	-	33.949.808.000,00	20.369.884.800,00	13.579.923.200,00	66,67
Jumlah	33.949.808.000,00	-	-	33.949.808.000,00	20.369.884.800,00	13.579.923.200,00	66,67

5.3.2.2 BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI Rp618.857.473,60

Beban Penyusutan dan Amortisasi terealisasi sebesar Rp618.857.473,60, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp775.255.924,35 mengalami **penurunan** sebesar Rp156.398.450,75 atau 20,17% dengan rincian sebagai berikut:

	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	433.213.058,01	611.307.441,33	(178.094.383,32)	(29,13)
2 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	134.386.979,69	125.441.955,24	8.945.024,45	7,13
3 Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	-	1.206.527,78	(1.206.527,78)	(100,00)
4 Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
5 Beban Penyusutan Aset Lainnya-Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-	-	-
6 Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	51.257.435,90	37.300.000,00	13.957.435,90	37,42
7 Beban Penyusutan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain	-	-	-	-
Jumlah	618.857.473,60	775.255.924,35	(156.398.450,75)	(20,17)

5.3.2.2.1 Beban Penyusutan dan Amortisasi Peralatan dan Mesin Rp433.213.058,01

Beban Penyusutan dan Amortisasi Peralatan dan Mesin terealisasi sebesar Rp433.213.058,01, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp611.307.441,33 mengalami **penurunan** sebesar Rp178.094.383,32 atau 29,13% dengan rincian sebagai berikut :

	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 Beban Penyusutan Alat Besar	-	80.018.750,00	(80.018.750,00)	(100,00)
2 Beban Penyusutan Alat Angkutan	116.387.000,00	184.215.750,00	(67.828.750,00)	(36,82)
3 Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	-	-	-	-
4 Beban Penyusutan Alat Pertanian	-	-	-	-
5 Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	98.110.558,01	104.261.166,34	(6.150.608,33)	(5,90)
6 Beban Penyusutan				

	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	69.010.600,00	66.712.166,67	2.298.433,33	3,45
7	Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	-	-	-	-
8	Beban Penyusutan Alat Laboratorium	-	-	-	-
9	Beban Penyusutan Alat Persenjataan	-	-	-	-
10	Beban Penyusutan Komputer	149.704.900,00	176.099.608,32	(26.394.708,32)	(14,99)
11	Beban Penyusutan Alat Eksplorasi	-	-	-	-
12	Beban Penyusutan Alat Pengeboran	-	-	-	-
13	Beban Penyusutan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	-	-	-	-
14	Beban Penyusutan Alat Bantu Eksplorasi	-	-	-	-
15	Beban Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	-	-	-	-
16	Beban Penyusutan Alat Peraga	-	-	-	-
17	Beban Penyusutan Peralatan Proses/Produksi	-	-	-	-
18	Beban Penyusutan Rambu-rambu	-	-	-	-
19	Beban Penyusutan Peralatan Olahraga	-	-	-	-
	Jumlah	433.213.058,01	611.307.441,33	(178.094.383,32)	(29,13)

5.3.2.2.2 Beban Penyusutan dan Amortisasi Gedung dan Bangunan Rp134.386.979,69,00

Beban Penyusutan dan Amortisasi Gedung dan Bangunan terealisasi sebesar Rp134.386.979,69, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp125.441.955,24 mengalami **kenaikan** sebesar Rp8.945.024,45 atau % dengan rincian sebagai berikut :

	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %	
1	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	131.753.979,69	122.808.955,24	8.945.024,45	7,28
2	Beban Penyusutan Monumen	-	-	-	-
3	Beban Penyusutan Bangunan Menara	-	-	-	-
4	Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti	2.633.000,00	2.633.000,00	-	-
	Jumlah	134.386.979,69	125.441.955,24	8.945.024,45	7,13

5.3.2.2.3 Beban Penyusutan dan Amortisasi Aset Tak Berwujud Rp51.257.435,90

Beban Penyusutan dan Amortisasi Aset Tak Berwujud terealisasi sebesar Rp51.257.435,90, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp37.300.000,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp13.957.435,90 atau 37,42% dengan rincian sebagai berikut :

	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %	
1	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Frenchise	-	-	-	-

2	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Hak Cipta	-	-	-	-
3	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Hak Paten	-	-	-	-
4	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software	51.257.435,90	37.300.000,00	13.957.435,90	37,42
5	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Kajian	-	-	-	-
Jumlah		51.257.435,90	37.300.000,00	13.957.435,90	37,42

5.3.1 SURPLUS DEFISIT NON OPERASIONAL

Surplus Defisit Non Operasional terealisasi sebesar Rp1.050.000,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp1.050.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 Surplus Non Operasional	-	-	-	-
2 Defisit Non Operasional	1.050.000,00	-	1.050.000,00	-
Jumlah	1.050.000,00	-	1.050.000,00	-

5.3.1.1 SURPLUS NON OPERASIONAL Rp,00

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah **TIDAK ADA** Surplus Non Operasional.

5.3.1.2 DEFISIT NON OPERASIONAL Rp1.050.000,00

Defisit Non Operasional terealisasi sebesar Rp1.050.000,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp1.050.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	-	-	-	-
2 Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	-	-	-	-
3 Defisit dari Kegiatan Non Operasi Lainnya - LO	1.050.000,00	-	1.050.000,00	-
Jumlah	1.050.000,00	-	1.050.000,00	-

5.3.1.2.1 Defisit dari Kegiatan Non Operasi Lainnya Rp1.050.000,00

Defisit dari Kegiatan Non Operasi Lainnya terealisasi sebesar Rp1.050.000,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp1.050.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	1.050.000,00	-	1.050.000,00	-
2 Defisit Pelepasan Investasi Jangka Pendek-LO	-	-	-	-
Jumlah	1.050.000,00	-	1.050.000,00	-

Defisit dari Kegiatan Non Operasi Lainnya ini terjadi karena adanya penghapusan Aset Tetap Lainnya Rusak Berat berupa Barang Bercorak.

5.4. PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	2	3	4	5	6=(5/4)
1	Ekuitas Awal	17.281.713.958,68	17.439.852.334,19	(158.138.375,51)	(0,91)
2	Surplus/Defisit-LO	(610.019.478.567,32)	(115.758.899.620,29)	(494.260.578.947,03)	426,97
3	RK-PPKD	609.673.519.917,00	115.202.682.339,00	0,00	0,00
4	Koreksi Kesalahan/Penyesuaian	58.139.687,50	398.078.905,78	(339.939.218,28)	(85,39)
	Ekuitas Akhir	16.993.894.995,86	17.281.713.958,68	(494.758.656.540,82)	340,67

5.4.1 Ekuitas Awal

Saldo Ekuitas awal tahun 2023 sebesar Rp17.281.713.958,68 merupakan saldo akhir ekuitas tahun 2022.

5.4.2 Surplus/Defisit – LO

Surplus/defisit – LO sebesar (Rp610.019.478.567,32) merupakan surplus atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas pada Tahun 2023.

5.4.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak kumulatif karena perubahan kebijakan atau kesalahan mendasar sebesar (Rp,00,00), dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	Koreks/Penyesuaian Kas	-	-	-	-
2	Koreks/Penyesuaian Piutang	-	-	-	-
3	Koreks/Penyesuaian Penyisihan Piutang	-	-	-	-
4	Koreks/Penyesuaian Persediaan	-	-	-	-
5	Koreks/Penyesuaian Investasi Non Permanen	-	-	-	-
6	Koreks/Penyesuaian Penyisihan Investasi Non Permanen	-	-	-	-
7	Koreks/Penyesuaian Investasi Permanen	-	-	-	-
8	Koreks/Penyesuaian Aset Tetap	(48.035.000,00)	670.254.600,00	(718.289.600,00)	(107,17)
9	Koreks/Penyesuaian Penyusutan	63.424.687,50	(272.175.694,22)	335.600.381,72	(123,30)
10	Koreks/Penyesuaian Aset Lainnya	45.000.000,00	-	45.000.000,00	-
11	Koreks/Penyesuaian Amortisasi	(2.250.000,00)	-	(2.250.000,00)	-
12	Koreksi/Penyesuaian Penyusutan Aset Lainnya	-	-	-	-
13	Koreks/Penyesuaian Hutang Belanja Pegawai	-	-	-	-
14	Koreks/Penyesuaian Hutang Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-
15	Koreks/Penyesuaian Lain-Lain	-	-	-	-
	Jumlah	58.139.687,50	398.078.905,78	(339.939.218,28)	(85,39)

5.4.3.1 Koreksi/Penyesuaian Aset Tetap

Koreksi/Penyesuaian Aset Tetap sebesar (Rp48.035.000,00) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	Koreksi/Penyesuaian Tambah Aset Tetap dari Mutasi Belanja Tidak Terduga	-	-	-	-
2	Koreksi/Penyesuaian Tambah Aset Tetap dari Mutasi Antar SKPD	19.965.000,00	670.254.600,00	(650.289.600,00)	(97,02)
3	Koreksi/Penyesuaian Tambah Reklasifikasi antar Aset Tetap	-	-	-	-
4	Koreksi/Penyesuaian Tambah Reklasifikasi dari Aset Lainnya	-	-	-	-
5	Koreksi/Penyesuaian Tambah Penilaian Aset Tetap	-	111.870.000,00	(111.870.000,00)	(100,00)
6	Koreksi/Penyesuaian Tambah Aset Tetap dari Aset Ekstrakomtable	-	-	-	-
7	Koreksi/Penyesuaian Kurang Reklasifikasi antar Aset Tetap	-	-	-	-
8	Koreksi/Penyesuaian Kurang Reklasifikasi ke Aset Lainnya	-	-	-	-
9	Koreksi/Penyesuaian Kurang Aset Tetap dari Mutasi Belanja Tidak Terduga	-	-	-	-
10	Koreksi/Penyesuaian Kurang Aset Tetap dari Mutasi Antar SKPD	(68.000.000,00)	-	(68.000.000,00)	-
11	Koreksi/Penyesuaian Kurang Penilaian Aset Tetap	-	(111.870.000,00)	111.870.000,00	(100,00)
Jumlah		(48.035.000,00)	670.254.600,00	(718.289.600,00)	(107,17)

Koreksi/Penyesuaian Aset Tetap ini antara lain disebabkan oleh :

- Penambahan Aset Tetap Dari Mutasi Masuk berupa Personal Komputer sebesar Rp19.965.000,00
- Pelepasan Aset Tetap Dari Mutasi Keluar berupa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan sebesar Rp60.000.000,00 dan Kendaraan Bermotor Beroda Dua sebesar Rp8.000.000,00

5.4.3.2 Koreksi/Penyesuaian Penyusutan

Koreksi/Penyesuaian Penyusutan sebesar Rp63.424.687,50 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	Koreksi/Penyesuaian Tambah Penyusutan	(4.575.312,50)	(328.004.222,00)	323.428.909,50	(98,61)
2	Koreksi/Penyesuaian Kurang Penyusutan	68.000.000,00	55.828.527,78	12.171.472,22	21,80
Jumlah		63.424.687,50	(272.175.694,22)	335.600.381,72	(123,30)

Koreksi/Penyesuaian Penyusutan ini disebabkan oleh :

- Penambahan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Karena Mutasi Masuk berupa Akumulasi Penyusutan Personal Komputer sebesar Rp4.575.312,50.
- Pengurangan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Karena Mutasi Keluar berupa Akumulasi Penyusutan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan sebesar Rp60.000.000,00 dan Akumulasi Penyusutan Kendaraan Bermotor Beroda Dua sebesar Rp8.000.000,00.

5.4.3.3 Koreksi/Penyesuaian Aset Lainnya

Koreksi/Penyesuaian Aset Lainnya sebesar Rp45.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	Koreksi/Penyesuaian Tambah Aset Tak Berwujud	45.000.000,00	-	45.000.000,00	-
2	Koreksi/Penyesuaian Tambah Koreksi Aset Lainnya	-	-	-	-
3	Koreksi/Penyesuaian Tambah Mutasi dari Aset Tetap	-	-	-	-
4	Koreksi/Penyesuaian Tambah Aset Pemanfaatan	-	-	-	-
5	Koreksi/Penyesuaian Kurang Aset Tak Berwujud	-	-	-	-
6	Koreksi/Penyesuaian Kurang Mutasi ke Aset Tetap	-	-	-	-
7	Koreksi/Penyesuaian Kurang Koreksi Aset Lainnya	-	-	-	-
8	Koreksi/Penyesuaian Kurang Aset Pemanfaatan	-	-	-	-
Jumlah		45.000.000,00	-	45.000.000,00	-

Koreksi/Penyesuaian Aset Lainnya disebabkan oleh :

- a) Koreksi Tambah Aset Tidak Berwujud berupa Software sebesar Rp45.000.000,00

5.4.3.4 Koreksi/Penyesuaian Amortisasi

Koreksi/Penyesuaian Amortisasi sebesar (Rp2.250.000,00) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	Koreksi/Penyesuaian Tambah Amortisasi	(2.250.000,00)	-	(2.250.000,00)	-
2	Koreksi/Penyesuaian Kurang Amortisasi	-	-	-	-
Jumlah		(2.250.000,00)	-	(2.250.000,00)	-

Koreksi/Penyesuaian Amortisasi disebabkan oleh :

- a) Penambahan Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Karena Koreksi berupa Akumulasi Amortisasi Software sebesar Rp2.250.000,00.

5.4.4 Ekuitas Akhir

Ekuitas akhir sebesar Rp 16.993.894.995,86 dengan uraian sebagai berikut:

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	Ekuitas Akhir	16.993.894.995,86	17.281.713.958,68	(494.758.656.540,82)	(340,67)
Jumlah		16.993.894.995,86	17.281.713.958,68	(494.758.656.540,82)	340,67)

BAB 6

PENJELASAN INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung tugas Gubernur di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah (Sekda).

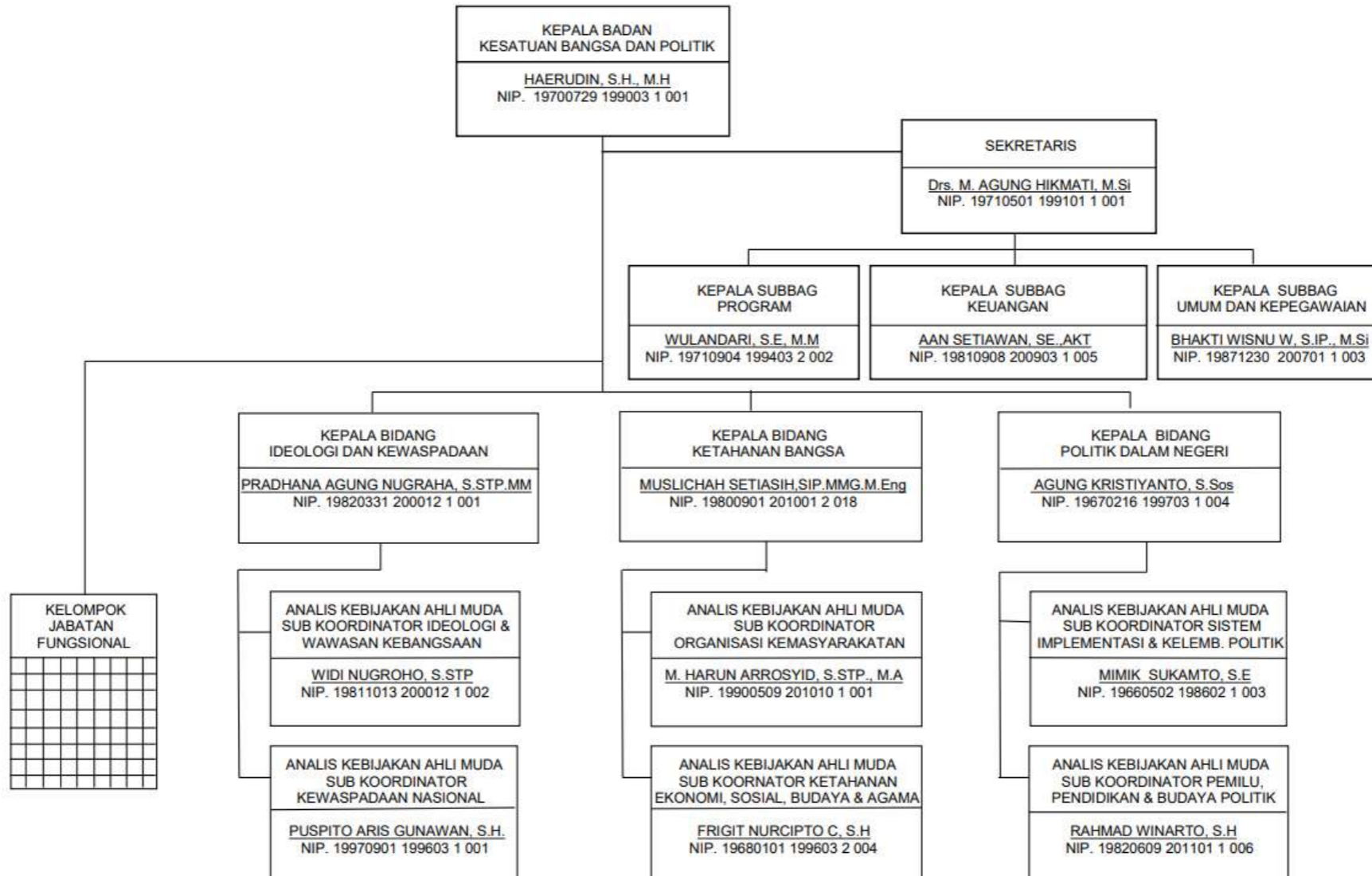
Pada Perda Nomor 7 Tahun 2008 Pasal 20 dinyatakan bahwa Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Kesbangpol menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- c. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang ideologi dan kewaspadaan, ketahanan bangsa, politik dalam negeri dan perlindungan masyarakat lingkup provinsi dan kabupaten/kota;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- e. Pelaksanaan kesekretariatan badan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan struktur organisasi Badan Kesbangpol pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Program;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Ideologi dan Kewaspadaan, membawahkan:
 1. Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 2. Subbidang Kewaspadaan Nasional.
- d. Bidang Ketahanan Bangsa, membawahkan:
 1. Subbidang Ketahanan Seni dan Budaya, Agama dan Kemasyarakatan;
 2. Subbidang Ketahanan Ekonomi.
- e. Bidang Politik Dalam Negeri, membawahkan:
 1. Subbidang Sistem, Implementasi dan Kelembagaan Politik;
 2. Subbidang Pemilu, Pendidikan dan Budaya Politik.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAWA TENGAH**



6.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat, maka strategi dan kebijakan Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan kesadaran, pemahaman, dan pengamalan nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan dan nasionalisme di masyarakat guna memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Strategi :

- a. Peningkatan kesadaran, pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan dan nasionalisme di masyarakat.
- b. Peningkatan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam bingkai NKRI.

Arah Kebijakan : Meningkatkan kegiatan pendidikan politik tentang ideologi politik, wawasan kebangsaan, dan nasionalisme yang mendorong persatuan dan kesatuan masyarakat dalam bingkai NKRI.

2. Mewujudkan kewaspadaan nasional dengan peningkatan partisipasi masyarakat dan penguatan peran kelembagaan masyarakat.

Strategi :

- a. Peningkatan pengetahuan dan partisipasi masyarakat mengenai deteksi dini dan pencegahan dini dalam rangka peningkatan kewaspadaan nasional.
- b. Peningkatan kapasitas kelembagaan di masyarakat dalam rangka peningkatan kewaspadaan nasional.

Arah Kebijakan :

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan mengenai deteksi dini dan pencegahan dini dalam rangka penanggulangan bencana alam dan bencana sosial.
- b. Menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat melalui optimalisasi peran KOMINDA, FKUB, FKUB, FPBI, di masyarakat.

3. Mewujudkan kualitas kehidupan politik yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan peningkatan partisipasi masyarakat

Strategi :

- a. Peningkatan kesadaran dan partisipasi politik masyarakat dalam setiap kegiatan politik khususnya pemilihan umum.

Arah Kebijakan :

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan politik di masyarakat tentang etika dan budaya politik demokrasi

4. Mewujudkan stabilitas masyarakat yang kondusif untuk mendukung terciptanya ketahanan bangsa dan perlindungan masyarakat di Jawa Tengah.

Strategi :

- a. Peningkatan peran masyarakat dalam mewujudkan kondusifitas daerah guna mendukung terciptanya ketahanan bangsa dan perlindungan masyarakat di Jawa Tengah

- b. Peningkatan sinergisitas antar pemangku kepentingan dalam rangka mewujudkan konduksifitas daerah guna mendukung terciptanya ketahanan bangsa dan perlindungan masyarakat di Jawa Tengah.

Arah Kebijakan :

- a. Meningkatkan peran masyarakat dalam mewujudkan konduksifitas daerah guna mendukung terciptanya ketahanan bangsa dan perlindungan masyarakat di Jawa Tengah.
- b. Meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam rangka mewujudkan konduksifitas daerah guna mendukung terciptanya ketahanan bangsa dan perlindungan masyarakat di Jawa Tengah
5. Mewujudkan peran lembaga sebagai penggerak masyarakat di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.

Strategi :

- a. Peningkatan kualitas aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.
- b. Peningkatan fasilitasi dalam rangka membangun sinergi antar kelompok masyarakat guna mewujudkan stabilitas masyarakat yang kondusif.

Arah Kebijakan :

- a. Meningkatkan peningkatan pengetahuan dan kualitas pelayanan aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.
- b. Memfasilitasi kerjasama dan sinergi antar daerah dan kelompok masyarakat guna mewujudkan stabilitas masyarakat Jawa Tengah yang kondusif.

6.3. Data Kepegawaian

Berdasarkan tingkat pendidikan, dari 52 orang PNS yang bekerja di Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah, sebanyak 11 orang pegawai berpendidikan Strata 2 (Pasca Sarjana), 28 orang berpendidikan Strata 1 (sarjana), 2 orang berpendidikan Diploma 3, 11 orang berpendidikan SLTA, 0 orang berpendidikan SLTP dan 0 berpendidikan SD.

Pegawai Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah

Menurut Pendidikan

Jenjang Pendidikan	Jumlah
Strata 2	11
Strata 1	28
Diploma 3	2
S L T A	11
S L T P	-
S D	-
Total	52

Sedang berdasarkan golongan kepegawaian, dari 52 orang PNS, terdiri dari Golongan II 7 orang; Golongan III 38 orang; Golongan IV 7 orang;

Pegawai Badan Kesbangpol Provinsi Jateng
Menurut Kepangkatan

Golongan II	Jumlah	Golongan III	Jumlah	Golongan IV	Jumlah
II/a	-	III/a	6	IV/a	5
II/b	-	III/b	6	IV/b	1
II/c	4	III/c	6	IV/c	1
II/d	3	III/d	20	IV/d	-
	7		38		7

Pegawai Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah
Menurut Eselon

Pejabat Eselon	Jumlah
Eselon II	1
Eselon III	4
Eselon IV	3
Analisis Kebijakan Ahli Muda	6
Total	14

6.4. Tindak Lanjut UU Nomor 23 Tahun 2014

Sesuai amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Oktober 2016 pengalihan pegawai Badan Kesbangpol provinsi dan kabupaten/kota menjadi pegawai kemendagri dan secara resmi per Januari 2017, Badan Kesbangpol sudah beroperasi sebagai instansi di bawah kendali kemendagri. Namun dengan penundaan pengesahan RPP yang menjadi payung hukum vertikalisasi Badan Kesbangpol itu, maka Badan Kesbangpol tetap menjadi satuan perangkat daerah, dengan tetap mendapatkan alokasi penganggaran 2017 dari APBD.

Selain itu dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan ditetapkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/Sj Tahun 2016 tentang tindak lanjut PP NO. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 122 ayat (1) menyatakan bahwa "Pada saat Peraturan Pemerintah ini berlaku, seluruh Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan" dan ayat (2) yang berbunyi "Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan".

Untuk itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengeluarkan aturan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah pada BAB VII Ketentuan Lain-lain Pasal 11 ayat (1) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 nomor 7 Seri D Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13), tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan. pada ayat (2) "Dalam hal Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergabung dengan urusan pemerintahan lain, Perangkat Daerah tersebut hanya melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik." Pada ayat (3) Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

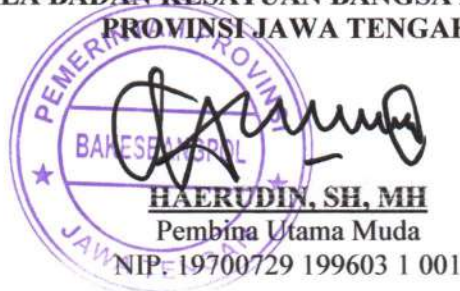
Sehingga pada tahun 2019, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah berubah nomenklatur menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah dan untuk Bidang Perlindungan Masyarakat bergabung dengan Saprol PP Provinsi Jawa Tengah.

BAB 7 PENUTUP

Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah ini merupakan rangkaian informasi terkini atas kondisi riil aspek keuangan Tahun Anggaran 2023. Di dalam penyusunan Laporan Keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan ini, struktur penganggarannya mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), walaupun belum sepenuhnya mengikuti Sistem dan Prosedur Akuntansi Keuangan Daerah sebagaimana diatur didalamnya.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa Catatan Atas Laporan Keuangan yang telah kami sajikan ini masih belum sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak, dalam rangka penyempurnaan untuk penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah pada periode yang akan datang.

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA TENGAH**



HAERUDIN, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19700729 199603 1 001